

**KAJIAN VIKTIMOLOGI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
KORBAN PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR YANG
MENGALAMI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR PASURUAN)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam
Ilmu Hukum

Oleh:

CLAUDIA QUROTA AKYUNIN

NIM 0910110131



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

LEMBAR PENGESAHAN

KAJIAN VIKTIMOLOGI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
KORBAN PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR YANG
MENGALAMI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

(Studi Kasus di Kepolisian Resor Pasuruan)

Oleh:

Claudia Qurota Akyunin

NIM. 0910110131

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal : Mei 2013

Ketua Majelis Penguji

Anggota Penguji

Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H.,M.S.

Dr. Ismail Navianto, S.H.,M.H.

NIP. 19540925 198003 1 002

NIP. 19550212 198503 1 003

Anggota Penguji

Anggota Penguji

Dr. Bambang Sudjito, S.H., M.H

Milda Istiqomah, S.H.,MTCP.

NIP. 19520605 198003 1 006

NIP. 19840118 200604 2 001

Ketua Bagian Hukum Pidana

Eny Harjati, S.H.,M.Hum.

NIP. 19590406 198601 2 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Dr. Sihabudin, S.H.,M.H.

NIP. 19591216 198503 1 001

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : KAJIAN VIKTIMOLOGI TENTANG
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN
PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR
YANG MENGALAMI TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI
KASUS DI KEPOLISIAN RESOR PASURUAN)

Identitas Penulis :
a. Nama : Claudia Qurota Akyunin
b. NIM : 0910110131

Konsentrasi : Hukum Pidana

Jangka Waktu Penelitian : 6 bulan

Disetujui pada tanggal : Mei 2013

Pembimbing Utama : Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H.,M.S.

NIP. 195409251980031002

Paham Triyoso, S.H.,M.Hum

NIP. 195405171982031003

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Pidana

Eny Harjati, S.H.,M.Hum.

NIP. 195904061986012001

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Sihabudin, SH. MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Eny Harjati, SH. M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Bapak Prof.Dr. I Nyoman Nurjaya, SH. M.S selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Bapak Paham Triyoso, SH. M.Hum selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan motivasinya.
5. Bapak Iptu Riyanto, SH selaku responden dari Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pasuruan, atas waktu dan kesempatannya untuk mengetahui lebih lanjut tindakan-tindakan yang diberikan oleh aparat kepolisian dalam melindungi korban.
6. Annisa Aninditha, Vania Delicia, Irul, dan Fakhrul selaku responden dan juga teman yang saya sayangi, berarti dan bermanfaat, atas kerjasama dan keberaniannya dalam memberikan keterangan akan kejadian yang telah mereka alami selaku korban dari pencurian dengan kekerasan.
7. Papa, Mama, Kevin, selaku orangtua dan adik yang selalu memberi semangat dan motivasi, menemani dalam pencarian data-data terkait, dan juga adik yang bersedia memberikan kamarnya untuk dipakai mengerjakan skripsi, kalian semua yang terbaik.
8. Eleven Girls (Arum, Cindy, Christy, Dita, Lita, Lina, Mondang, Shila, Vita, dan Zee) selaku teman dan sahabat yang selalu meluangkan waktunya untuk membantu agar kita semua lulus di saat yang bersamaan,

memberikan kekuatan, pengetahuan, dan pendapat. Masuk bersama-sama, lulus pun bersama-sama.

9.Seluruh kawan-kawan Himakopi 09, kita susah bersama-sama, dan semoga kita semua bisa menjadi anggota Himakopi 09 yang membanggakan.

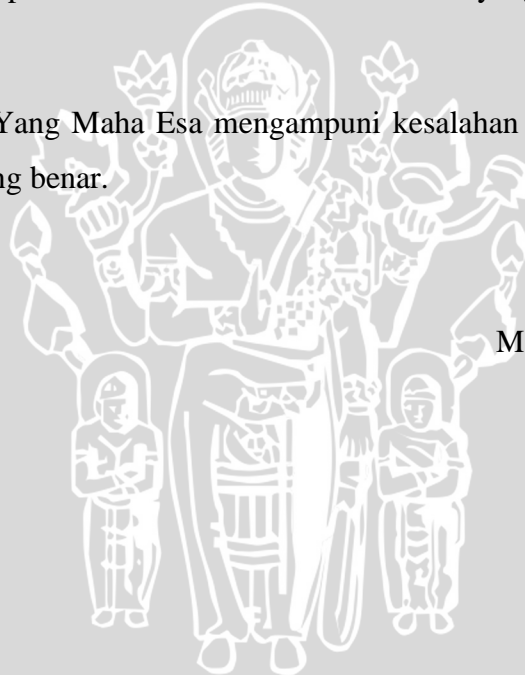
Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang sengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Maret 2013

Penulis



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| Lembar Pengesahan | i |
| Lembar Persetujuan | ii |
| Kata Pengantar | iii |
| Daftar Isi | v |
| Daftar Tabel | viii |
| Daftar Gambar | ix |
| Ringkasan | x |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Sistematika Penulisan Hukum | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 12 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan | |
| A1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian | 12 |
| A.2. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan | 15 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Korban | |
| B.1 Pengertian Korban | 22 |
| B.2 Klasifikasi Korban | 24 |
| B.3 Hak-hak Korban | 28 |
| B.4 Peranan Korban | 32 |
| B.5 Dampak Psikologi Korban Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan..... | 36 |

| | |
|--|----|
| C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum | |
| C.1 Pengertian Perlindungan Hukum | 39 |
| C.2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Korban | |
| Kejahatan | 41 |
| C.3 Tugas dan Wewenang Polisi | 44 |

BAB III METODE PENELITIAN 50

| | |
|--|----|
| A. Jenis Penelitian | 50 |
| B. Metode Pendekatan | 50 |
| C. Lokasi Penelitian | 51 |
| D. Jenis Data | 51 |
| E. Sumber Data | 52 |
| F. Teknik Pengumpulan Data | 53 |
| G. Populasi, Sampel, dan Responden | 54 |
| H. Teknik Analisis Data | 55 |
| I. Definisi Operasional | 56 |

BAB IV PEMBAHASAN..... 57

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 57 |
| 1.Wilayah Hukum | 57 |
| 2.Struktur Organisasi | 60 |
| 3. Data Kriminalitas | 70 |
| B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pengendara | |
| Kendaraan Bermotor yang Mengalami Tindak Pidana Pencurian | |
| dengan Kekerasan..... | 82 |
| C. Hak-hak yang Didapat Korban Pencurian dengan | |
| Kekerasan | 88 |

D. Upaya Kepolisian Resor Pasuruan dalam Menanggulangi Tindak

Pidana Pencurian dengan Kekerasan 91

BAB V PENUTUP 94

A. Kesimpulan 94

B. Saran 96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Halaman

| | |
|---------------|----|
| Tabel I. | 71 |
|---------------|----|



DAFTAR GAMBAR

Bagan 1.61

Bagan 2.68



RINGKASAN

CLAUDIA QUROTA AKYUNIN, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2013, *Kajian Viktimologi tentang Perlindungan Hukum bagi Korban Pengendara Kendaraan Bermotor yang Mengalami Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kasus di Kepolisian Resor Pasuruan)*, Prof.Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H. M.S; Paham Triyoso, S.H.M.Hum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang didapatkan oleh korban pengendara kendaraan bermotor yang mengalami tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat Yuridis sosiologis, dengan cara melakukan penelitian untuk mengetahui hak-hak yang didapatkan oleh korban berikut perlindungan hukum apa saja yang diberikan dan bagaimana upaya dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu data primer diperoleh dengan wawancara secara langsung dengan korban-korban dan juga Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Pasuruan, dan data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan baik berupa buku-buku, dan dokumen, serta studi lapangan. Teknik analisa data yang digunakan penulis adalah deskriptif analisis yaitu dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang relevan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu pertama. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan Kepolisian Resor Pasuruan yakni dengan memberikan pelayanan terhadap korban dengan menerima laporannya dan menindaklanjuti kasus tersebut hingga proses tingkat kejaksaan. Selain itu, memberikan jaminan keamanan berupa melakukan patroli jalan raya untuk mengantisipasi kejahatan, dan mempertajam krinreserse masing-masing wilayah untuk mempersempit ruang gerak pelaku.

Kedua, bentuk perlindungan hukum yang didapatkan para korban yakni hanya menerima bukti surat kehilangan, dan lamanya prosedur untuk melanjutkan proses penyelidikan dan mengabaikan rasa trauma yang dihadapi korban menjadi kelemahan sistem perundang-undangan kita dalam melindungi korban.

Ketiga, kendala yang dialami aparat Kepolisian Resor Pasuruan sehingga sampai saat ini masih cukup banyak tindak pidana pencurian dengan kekerasan dikarenakan para pelaku sangat lihai, modus yang digunakan lebih canggih, dan juga kurangnya personil.

Kata kunci : Bentuk Perlindungan Hukum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 banyak menimbulkan permasalahan baru, salah satunya di bidang ekonomi. Sulitnya masyarakat mendapatkan pekerjaan dikarenakan minimnya lapangan pekerjaan mengakibatkan angka pengangguran Per-Agustus 2012 sebanyak 7,244,956 penduduk.⁸¹ Di sisi lain, harga kebutuhan pokok juga semakin melambung tinggi. Maka dari itu, dengan tingginya angka pengangguran berikut diiringi juga tingginya harga kebutuhan pokok, dapat membuat seseorang bertindak lebih untuk melakukan suatu kejahatan sehingga angka kejahatan juga semakin tinggi.

Pola-pola kejahatan tersebut semakin jelas tergambar disaat kondisi negara dalam keadaan tidak stabil, munculnya penjarahan, pembunuhan, dan pemerkosaan yang dilakukan secara beramai-ramai, sehingga masyarakat menjadi tidak dapat menikmati kehidupan dengan nyaman dan tentram.⁸²

Menurut Sue Titus Reid, kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang

⁸¹ Hasil data melalui web *bps.go.id*, diakses pada tanggal 04 Februari 2013.

⁸² Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, P.T. Alumni, Bandung, 2009, hal 80.

dilakukan tanpa suatu pembelaan atau atas dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.⁸³

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Pencurian menurut Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah : “Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. Dari media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringkali terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya di latarbelakangi karena kebutuhan hidup.

Bentuk kejahatan lainnya yang sering terjadi salah satunya adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pencurian disertai dengan kekerasan menurut Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah : “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.”

⁸³ Mohammad Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal 3.

Berdasarkan pra survei yang dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Pasuruan berdasarkan catatan awal tahun 2012 di bulan Januari sampai dengan September terdapat 10 kasus pencurian dengan kekerasan.⁸⁴ Tindak pidana tersebut semakin sering terjadi di tempat atau lokasi yang sama. Korban-korban tersebut tidak hanya mengalami kerugian materi, namun mereka juga mengalami kerugian psikis.

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁸⁵

Dalam penegakan hukum kelemahan mendasar adalah terabaikannya hak korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana maupun akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan karena perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tidak mendapat pengaturan yang memadai.⁸⁶

⁸⁴ Data Kriminalitas Kepolisian Resor Pasuruan 2012.

⁸⁵ Sudikno Mertokusomo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal 71.

⁸⁶ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Pres, Malang, 2005, hal 2.

Pengaturan tentang Korban dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sangat sedikit pasal-pasal yang berkaitan tentang korban. Selain pembahasan yang tidak fokus terhadap eksistensi korban tindak pidana melainkan hanya sebagai warga negara biasa yang mempunyai hak yang sama dengan warga negara lain.⁸⁷

Dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immateriil maupun materiil. Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan.⁸⁸

Dalam kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sering kali korban hanya diposisikan sebagai pemberi kesaksian,⁸⁹ sebagai pelapor dalam proses penyidikan, dan sebagai sumber informasi, atau sebagai salah satu kunci penyelesaian perkara.⁹⁰

Sebagai contoh kasus yang bisa dijadikan suatu alasan bahwa kurang jelasnya bentuk perlindungan hukum bagi korban pengendara kendaraan bermotor yang mengalami tindak pidana pencurian dengan kekerasan apabila seorang pelaku tindak pidana kejahatan pencurian dengan kejahatan melakukan aksinya di jalan raya dengan mencari korban

⁸⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 80-81 merujuk tentang korban. Pasal 98-99: pihak yang dirugikan. Pasal 108: Pengadu atau pelapor.

⁸⁸ Chaerudin, Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Ghalia Press, Jakarta, 2004, hal 47.

⁸⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, C.V Akademika, 1989, hal 94.

⁹⁰ Chaerudin, Syarif Fadillah, *op.cit.*, hal 51.

pengendara motor menggunakan clurit untuk mendapatkan harta benda korban dan pelaku tersebut berhasil meloloskan diri dalam aksinya. Korban pun melaporkan aksi kejahatan yang baru saja dialaminya, dan memberikan kesaksian kepada aparat kepolisian. Setelah memberikan kesaksian, korban dikembalikan ke keluarganya.⁹¹ Dalam hal ini, penderitaan yang dialami korban kasus kejahatan kekerasan sangat beragam, tidak saja penderitaan secara ekonomi, tetapi juga secara medis, dan psikis.

Persoalan pelaku kejahatan berhasil ditangkap oleh para aparat kepolisian secara tidak langsung mempengaruhi rasa trauma yang dialami korban. Realitanya korban hanya memberikan kesaksian dan diserahkan kembali ke keluarganya. Dalam Pasal 5 ayat 1(f) Undang-Undang nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa korban maupun saksi berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus. Jika korban mengalami pelanggaran hak asasi manusia yang berat sesuai Pasal 6 (a) dan (b) Undang-Undang nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, para korban tersebut berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Dalam pemenuhan hak-hak korban sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini jarang sekali di paparkan oleh aparat kepolisian. Tentang kejelasan kasus yang telah terjadi, dan berhak mereka untuk memperoleh bantuan medis.

⁹¹ Hasil wawancara dengan korban Annisa Aninditha, Vania Delicia, Irul, Fajar, tanggal 2-3 Oktober 2012.

Adapun yang menjadi dasar memperhatikan kedudukan si korban dalam tindak pidana adalah belum adanya pengaturan yang sempurna mengenai korban secara yuridis, yang menunjukkan adanya pengayoman serta keadilan dan ketertiban. Selain itu, adanya kekurangan dalam usaha pencegahan terjadinya korban-korban baik karena kurangnya penyuluhan, maupun bertambahnya pembiaran terjadinya penyimpangan dan tindakan pidana dengan sengaja oleh masyarakat karena beberapa hal tertentu.⁹²

Dalam penegakan Hukum Pidana Nasional (baik KUHP dan KUHAP) harus dilaksanakan sesuai dengan isi ketentuan Hukum Pidana Nasional tersebut. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayan medis, dan bantuan hukum.⁹³ Dalam penanganan perkara pidana, kepentingan korban sudah saatnya untuk diberikan perhatian khusus, selain sebagai saksi yang mengetahui terjadinya suatu kejahatan juga karena kedudukan korban sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan sederajat di depan hukum (*equality before the law*).⁹⁴ Selain itu, setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh Undang-Undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹² Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, 1983, hal 58-59.

⁹³ Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*, P.T Raja Grafindo Persada, 2007, hal 31.

⁹⁴ *Ibid.*

Dengan adanya kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka program *Quick Wins* yang diimplementasikan di jajaran kepolisian salah satunya adalah menuntut adanya transparansi dalam Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, dimana hal ini berarti bahwa Penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) harus diberikan sesuai jadwal dan terstruktur secara kepada yang bersangkutan.

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) adalah surat yang diberikan kepada pelapor / pengadu tentang perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan yang ditandatangani oleh atasan penyidik dengan melalui tahapan-tahapan sesuai dengan ringan atau beratnya suatu kasus.⁹⁵ Dengan adanya SP2HP ini diharapkan dapat diberikan kepada korban maupun pelapor terkait dengan kasusnya, karena SP2HP termasuk bentuk dari perlindungan hukum dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus. Pemberlakuan SP2HP berikut dengan segala bentuk perlindungan hukum maupun hak-hak apa saja yang didapatkan korban sehingga mendorong penulis untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai : “ KAJIAN VIKTIMOLOGI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR YANG MENGALAMI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN”.

⁹⁵ Telaah Penerapan SP2HP, (Online) <http://sapto.staff.uns.ac.id/files/2010/01/telaah-penerapan-sp2hp1.pdf>, 04 Pebruari 2013.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan hukum yang dapat diangkat dari latar belakang dalam penelitian ini, sebagai berikut;

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban pengendara kendaraan bermotor yang mengalami tindak pidana pencurian dengan kekerasan?
2. Apa saja hak-hak yang didapatkan korban pengendara kendaraan bermotor yang mengalami tindak pidana pencurian dengan kekerasan?
3. Bagaimana upaya Kepolisian Resor Pasuruan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk memahami dan menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum yang didapatkan korban pengendara kendaraan bermotor yang mengalami tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
2. Untuk mengurai dan menganalisis lebih lanjut hak-hak apa saja yang didapatkan oleh korban pengendara kendaraan bermotor yang mengalami tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana upaya Kepolisian Resor Kabupaten Pasuruan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang bisa diperoleh disamping tujuan di atas adalah sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk menunjang perkembangan ilmu hukum khususnya di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh dan mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban dan hak-hak korban yang mengalami tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

b. Bagi Kepolisian Resor Pasuruan

Agar para penegak hukum dalam hal ini Polisi yang menangani Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan meningkatkan pelayanan dan mutu Kepolisian Resort beserta jajaran Kepolisian Sektor, sehingga harapan kedepannya bisa memberikan pelayanan dan sikap cepat tanggap untuk tiap kasus yang ada.

c. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penulisan ini diharapkan masyarakat menjadi suatu pegangan bahwa para aparat kepolisian akan melindungi masyarakat/warga negara dari segala ancaman kejahatan. Sehingga nantinya bisa menciptakan suasana yang aman dan tentram.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan sebagaimana setiap penulisan yang bersifat ilmiah maka dalam penulisan ini, penulis membagi ke dalam lima bab yang masing-masing bab terbagi lagi dalam beberapa sub bab.

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam Bab 1 ini, penulis membaginya dalam beberapa sub bab, di antaranya adalah: Latar Belakang, Rumusan Masalah atau Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis akan menerangkan tentang Tinjauan Pustaka yang akan digunakan untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam tinjauan pustaka ini diuraikan tentang tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, tinjauan umum tentang korban, dan tinjauan umum tentang perlindungan hukum.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi mengenai metode pendekatan penelitian, lokasi penelitian, beserta alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengambilan data, dan definisi operasional.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan membahas mengenai gambaran umum dari lokasi penelitian yaitu Kepolisian Resort Kabupaten Pasuruan, bentuk perlindungan hukum terhadap korban pengendara kendaraan bermotor yang mengalami tindak pidana pencurian dengan kekerasan, hak-hak yang didapatkan korban pengendara kendaraan bermotor yang mengalami pencurian dengan kekerasan, upaya Kepolisian Resort kabupaten Pasuruan dalam mengurangi dan mencegah tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan dari keseluruhan uraian yang telah berasal dari bab-bab sebelumnya. Selanjutnya dalam bab ini, penulis akan mengemukakan saran-saran sehubungan dengan uraian sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

a. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang menyatakan:

“Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900,-“

Unsur-unsur Objektif terdiri dari:

a. Perbuatan mengambil;

Mengambil adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau ke dalam kekuasaanya.⁹⁶

⁹⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Banyumedia, Malang, 2006, hal 5-6.

b. Objeknya suatu benda;

Menurut MvT (*Memori van Toelichting*) benda yang menjadi objek pencurian adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*Roerend Goed*) dan benda-benda berwujud (*Stoffelijk Goed*). Pengertian benda tersebut tidak sepenuhnya didasarkan dalam MvT sebagai benda bergerak dan benda berwujud, akan tetapi pada benda yang bernilai atau berharga seperti nilai ekonomis. Syarat bernilainya suatu benda tidak harus bagi semua orang akan tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini adalah bagi pemiliknya.⁹⁷

c. Unsur Keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Dimana benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri.⁹⁸

Unsur-unsur Subjektif, terdiri dari:

a. Adanya maksud untuk memiliki;

Menurut Satochid Kartanegara, unsur memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Sedangkan unsur maksud adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung

⁹⁷ *Ibid*, hal 9.

⁹⁸ *Ibid*, hal 11.

suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan suatu miliknya.⁹⁹

b. Dengan melawan hukum.

Maksudnya adalah bahwa sebelum bertindak untuk melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain yang bertentangan dengan hukum.¹⁰⁰

Ketentuan pasal 362 KUHP di atas merupakan bentuk tindak pidana pencurian yang pokok, jadi merupakan bentuk pencurian yang paling sederhana. Tindak Pidana pencurian dalam bentuk pokok di atas apabila diikuti adanya unsur-unsur pemberat, maka akan berubah menjadi tindak pidana pencurian yang dikualifikasi/ pencurian dengan pemberatan.¹⁰¹ Tindak pidana pencurian tersebut diatur di Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikualifikasi/ dengan pemberatan sebagai berikut :

(1) Diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun :

Ke-1 Pencurian Ternak

Ke-2 Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal

⁹⁹ *Ibid*, hal 13.

¹⁰⁰ *Ibid*, hal 15.

¹⁰¹ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, 2012, hal 111.

terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara atau pemberontakan atau bahaya perang.

Ke-3 Pencurian di waktu dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Ke-4 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Ke-5 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika Pencurian yang diterangkan dalam dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana paling lama sembilan tahun.¹⁰²

b. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Banyaknya jenis-jenis tindak pidana pencurian adalah salah satu bukti tindak pidana pencurian meningkat dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

¹⁰² *Ibid*, hal 112.

Mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pencurian dengan kekerasan bisa diartikan dengan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dikuasainya.¹⁰³

Rumusan dari Pasal 365 KUHP merupakan rumusan tindak pidana materiil, yaitu suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang atau akibat konstitutif). Tindakan pencurian dengan kekerasan bisa dijerat dengan Pasal 365 ayat 3 KUHP apabila pencurian dengan kekerasan tersebut telah mengakibatkan hilangnya nyawa atau matinya korban. Jika tidak ada kematian akibat pencurian dengan kekerasan tersebut, maka pencurian dengan kekerasan itu tidak dapat dijerat dengan Pasal 365 ayat 3 KUHP, melainkan Pasal 365 KUHP. Hal ini juga berlaku pada pasal-pasal KUHP yang mengatur kejahatan terhadap harta benda.

Pencurian sebagaimana dirumuskan di atas, dalam praktik dikenal sebagai pencurian dengan kekerasan. Oleh sebab dilakukan dengan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan. Berdasarkan ancaman pidananya, pencurian yang diperberat ini, dibedakan menjadi 4 bentuk,

¹⁰³ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal 16.

dan di masing-masing bentuk tersebut terdapat upaya kekerasan maupun ancaman kekerasan. Empat bentuk tersebut adalah :

1. Bentuk pertama, sebagaimana diatur dalam ayat 1 yang memuat semua unsur dari pencurian dengan kekerasan, yang diancam dengan pidana maksimum 9 tahun. Unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 362, baik yang bersifat objektif maupun subjektif, berupa unsur-unsur pencurian dalam bentuk standar/bentuk pokok. Unsur-unsur ini sudah tercakup dalam perkataan pencurian dalam Pasal 365 ayat (1) tersebut
- b. Kemudian ditambahi dengan unsur-unsur khusus, yaitu unsur-unsur yang bersifat memberatkan pencurian, yakni :

A. Unsur-unsur objektif.

(1) cara atau upaya-upaya yang digunakan berupa :

- a. kekerasan, atau
- b. ancaman kekerasan

(2) yang ditujukan pada orang.

(3) waktu penggunaan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan itu, ialah :

- a) sebelum;

- b) pada saat, atau;
- c) setelah berlangsungnya pencurian.

B. Unsur-unsur Subyektif :

Unsur subyektifnya ialah maksud digunakannya kekerasan ataupun ancaman kekerasan itu ditujukan pada 4 hal, yaitu :

- (1) Untuk mempersiapkan ;
- (2) Untuk mempermudah pencurian ;
- (3) Apabila tertangkap tangan memungkinkan untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya ;
- (4) Apabila tertangkap tangan dapat tetap menguasai benda hasil curiannya.¹⁰⁴

Untuk terjadinya atau selesainya pencurian dengan kekerasan ini, tidak perlu keempat hal yang dituju oleh maksud itu benar-benar terwujud karena unsur untuk itu hanya dituju oleh maksud si pembuat saja. Menjadi syarat untuk selesainya atau terjadinya pencurian bentuk ini adalah terjadinya upaya kekerasan atau ancaman kekerasan, disamping telah dipenuhinya unsur dalam Pasal 362. Unsur yang dirasa perlu penjelasan lebih lanjut, adalah kekerasan dan ancaman kekerasan.

Penggunaan kekuatan fisik adalah merupakan ciri dari kekerasan yang membedakannya dengan ancaman kekerasan. Hal ini terbukti jika

¹⁰⁴*Ibid*, hal 30-31

dihubungkan dengan akibat kekerasan pada sub 4 ayat 2 dan 3 Pasal 365, berupa luka berat ataupun kematian.

Sedangkan ancaman kekerasan adalah berupa ancaman kekerasan fisik. Dalam ancaman kekerasan, kekuatan atau tenaga badan yang cukup besar itu belum benar-benar diwujudkan dan akan benar-benar digunakan apabila menurut pikiran atau pertimbangan petindak, bahwa dengan ancaman itu korban belum/tidak menjadi tidak berdaya. Dari ancaman kekerasan, walaupun kekuatan badan itu belum diwujudkan, sudah dapat membuat orang yang menerima ancaman itu secara psikis menjadi tidak berdaya. Ketidakberdayaan korban secara psikis, seperti perasaan takut akan dilukai, takut akan dibunuh. Keadaan psikis korbanyang demikian inilah, yang menyebabkan petindak dapat melangsungkan pencurian.¹⁰⁵

2. Bentuk kedua, yakni pada ayat 2 yang diancam dengan pidana penjara maksimum 12 tahun, yang dibagi lagi menjadi 4 bentuk, yang masing-masing memuat unsur-unsur berupa :

- 1) semua unsur pencurian bentuk pokok (Pasal 362) ;
- 2) ditambah unsur-unsur khusus dalam ayat 1 Pasal 365 ; dan
- 3) ditambah unsur-unsur lebih khusus lagi bersifat alternatif, yang merupakan ciri masing-masing bentuk dari 4 yang dimaksud dalam ayat 2 Pasal 365, yaitu :

- a) Pertama, yang terdiri dari 4 bentuk lagi, yakni :

¹⁰⁵ Ibid, hal. 32-33.

Pencurian yang dilakukan waktu malam di :

- (1) di tempat kediaman, atau
- (2) pekarangan tertutup yang didalamnya ada tempat kediamannya, atau
- (3) di jalan umum, atau
- (4) di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.¹⁰⁶

b) Kedua, pelakunya lebih dari satu orang dengan bersekutu.

Sudah diterangkan bahwa, unsur lebih dari satu orang yang dengan bersekutu adalah kualitas dari orang-orang yang terlibat kejahatan sebagai yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat 1 KUHP.

c) Ketiga, cara masuk atau sampai pada benda yang dicuri dengan :

- (1) merusak ;
- (2) memanjat ;
- (3) memakai anak kunci palsu ;
- (4) perintah palsu ;
- (5) pakaian jabatan palsu.

d) Keempat, timbulnya akibat luka berat.

¹⁰⁶ *Ibid*, hal 34-35.

Antara kekerasan dengan akibat luka berat harus ada hubungan sebab dan akibat, yang maksudnya adalah bahwa luka berat itu adalah disebabkan langsung oleh digunakannya kekerasan.¹⁰⁷

3. Pencurian dengan kekerasan bentuk yang ketiga, yakni yang diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun.

Pencurian dengan kekerasan bentuk ketiga ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (3), yang harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Semua unsur pencurian bentuk pokok (Pasal 362) ;
 - 2) Unsur-unsur pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat 1) ;
 - 3) Adanya akibat kematian orang.¹⁰⁸
4. Pencurian dengan kekerasan bentuk keempat, adalah yang terberat, karena diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun, yaitu apabila tergabungnya unsur-unsur sebagai berikut :
- 1) Semua unsur pencurian bentuk pokok (Pasal 362) ;
 - 2) Semua unsur pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat 1) ;
 - 3) Unsur timbulnya akibat : luka berat atau matinya orang ;

¹⁰⁷ *Ibid*, hal. 36.

¹⁰⁸ *Ibid*, hal. 37

- 4) Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu ;
- 5) Ditambah salah satu dari :
 - a) Waktu melakukan pencurian,
 - b) Unsur cara-caranya untuk masuk atau sampai pada tempat melakukan kejahatan.¹⁰⁹

Letak diperberatnya pidana pada bentuk pencurian dengan kekerasan yang terakhir ini, dari ancaman pidana maksimum 15 tahun penjara (365 ayat 2) menjadi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun, adalah tergabungnya unsur pada butir 3,4, dan 5.

2. Tinjauan Umum Tentang Korban

a. Pengertian Korban

Dalam suatu peradilan pidana pihak-pihak yang berperan adalah penuntut umum, hakim, terdakwa, dan penasihat hukum serta saksi-saksi. Pihak korban diwakili oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi (korban).¹¹⁰

Menurut kamus *Crime Dictionary* pengertian yang dikutip oleh seorang ahli *victim* atau korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau

¹⁰⁹ Ibid, hal. 38.

¹¹⁰ Bambang Waluyo, *Viktimologi, Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 8.

mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.¹¹¹

Selanjutnya secara yuridis pengertian korban termuat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan :“korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Berdasarkan rumusan tersebut, yang disebut korban adalah :

1. Setiap orang,
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
3. Kerugian ekonomi,
4. Akibat tindak pidana.¹¹²

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi-saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat :”korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror dan kekerasan pihak mana pun.”¹¹³

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga :”korban adalah orang

¹¹¹ Abdussalam, *Victimology*, PTIK, Jakarta, 2010, hal 5.

¹¹² Bambang Waluyo, *op.cit.*, hal 10.

¹¹³ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat.

yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.”¹¹⁴

Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi :”korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban atau ahli warisnya.”¹¹⁵

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa pengertian korban tidak ada satu pengertian yang baku dan hakikatnya adalah sama, yakni sama-sama sebagai korban tindak pidana yang mengalami penderitaan baik secara fisik, mental, dan kerugian ekonomi. Tentu saja tergantung sebagai korban tindak pidana apa, misalnya pencurian dengan kekerasan.

b. Klasifikasi Korban

Berbicara mengenai korban kejahatan pada awalnya tentu korban orang perseorangan atau individu. Pandangan begini tidak salah, karena untuk kejahatan yang lazim terjadi di masyarakat memang demikian. Misalnya pembunuhan, penganiayaan, pencurian, dan sebagainya.

¹¹⁴ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹¹⁵ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Kemudian sejak viktimologi diperkenalkan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mengkaji permasalahan korban serta segala aspeknya, maka Wolfgang melalui penelitiannya menemukan bahwa ada beberapa macam korban yaitu sebagai berikut :

1. Korban Perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun nonmateriil,
2. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam,
3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang di dalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab,
4. Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian, hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak

ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.¹¹⁶

Adapun klasifikasi korban dibagi menjadi berbagai macam bentuk lagi, yaitu :

1. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan terjadinya korban, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Dalam hal ini tanggungjawab sepenuhnya terletak pada pelaku,
2. *Provocative Victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya kasus selingkuh, dimana korban juga sebagai pelaku,
3. *Participating Victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban,
4. *Biologically weak Victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan atau potensi untuk menjadi korban, misalnya orang tua renta, anak-anak dan orang yang tidak mampu berbuat apa-apa.
5. *Socially Weak Victims*, Yaitu mereka yang memiliki kedudukan social yang lemah yang menyebabkan mereka

¹¹⁶ Bambang Waluyo, *op.cit.*, hal 11-12.

menjadi korban, misalnya korban perdagangan perempuan, dan sebagainya,

6. *Self Victimizing Victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, pengguna obat bius, judi, aborsi dan prostitusi.¹¹⁷

Sedangkan menurut Kongres PBB ketujuh tahun 1985 di Milan dengan topik *Victim of Crime* mengklompokkan macam-macam korban sebagai berikut :

1. Korban kejahatan konvensional adalah korban yang diakibatkan oleh tindak pidana biasa atau kejahatan biasa misalnya, pembunuhan, perkosaan, penganiayaan dan lain-lain,
2. Korban non-konvensional adalah korban kejahatan yang diakibatkan oleh tindak pidana berat seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba secara tidak sah, kejahatan terorganisir dan kejahatan komputer,
3. Korban kejahatan akibat penyalahgunaan kekuasaan (*Illegal abuses of power*) terhadap hak asasi manusia alat penguasa termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya.¹¹⁸

¹¹⁷ Yurianto Kadir, *Hukum dan Viktimologi Part 2* (Online), [http://yusriantokadir.files.wordpress.com/hukum dan viktimologi part II](http://yusriantokadir.files.wordpress.com/hukum-dan-viktimologi-part-II/), diakses pada tanggal 15 Oktober 2012.

¹¹⁸ *Ibid*

Pengelompokan atas macam-macam korban tersebut didasarkan atas perkembangan masyarakat. Terhadap korban kategori ketiga adanya korban penyalahgunaan kekuasaan berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia.¹¹⁹

c. Hak-Hak Korban

Setiap hari masyarakat banyak memperoleh informasi tentang berbagai peristiwa kejahatan, baik yang diperoleh dari berbagai media massa cetak maupun elektronik. Peristiwa-peristiwa kejahatan tersebut tidak sedikit menimbulkan berbagai penderitaan/kerugian bagi korban dan juga keluarganya.

Guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas, tentunya kejahatan-kejahatan ini perlu ditanggulangi baik melalui pendekatan yang sifatnya preempetif, preventif maupun represif, dan semuanya harus ditangani secara profesional serta oleh suatu lembaga yang berkompeten.¹²⁰

Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak-hak dan juga kewajiban yang tertuang dalam setiap perundang-undangan dan konstitusi. Dalam Hukum Acara Pidana diatur juga berbagai hak dari tersangka dan/atau terdakwa. Sudah semestinya pihak korban pun mendapatkan perlindungan, yang diantaranya terpenuhinya hak-hak korban meskipun diimbangi dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada.

¹¹⁹ *Ibid*

¹²⁰ Didik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *op.cit.*, hal 51.

Hak-hak korban dalam peraturan perundang-undangan fokus hanya pada kerugian fisik yang dihitung dengan ganti rugi dan mengabaikan kerugian psikis yang dialami korban.

Hak-hak korban secara yuridis dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 5 Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 menyatakan beberapa hak korban dan saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya,
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan,
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan,
4. Mendapat penerjemah,
5. Bebas dari pertanyaan menjerat,
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus,
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan,
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan,
9. Mendapat identitas baru,
10. Mendapatkan tempat kediaman baru,

11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan,
12. Mendapat nasihat hukum,
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.¹²¹

Dalam penerapannya tentu saja harus diterapkan secara bijaksana, agar tidak menimbulkan kesan diskriminatif yang tertuang dalam 13 hak tersebut. Sebenarnya ada hak perlindungan yang bersifat otomatis, yaitu pemenuhan hak dan perlindungan yang diberikan oleh negara. Hak-hak ini termasuk hak asasi manusia (HAM) bangsa Indonesia yang dijamin konstitusi, undang-undang HAM, dan perundang-undangan lainnya.¹²²

Selaras dengan hak yang telah disebut, menurut Van Boven yaitu:

“Hak-hak para korban adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan, dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun non material bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak tersebut telah terdapat dalam yurisprudensi komite-komite hak asasi manusia internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia”.¹²³

¹²¹ Bambang Waluyo, *op.cit.*, hal 40-41.

¹²² *Ibid*, hal 42.

¹²³ Rena Yulia, *Victimologi, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Bandung, 2010, hal. 55.

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), korban berhak mendapatkan:

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dengan dari pengadilan;
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelayanan bimbingan rohani.

Menurut Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 40/A/Res/34 Tahun 1985 juga telah menetapkan beberapa hak korban (saksi) agar lebih mudah memperoleh asas keadilan, khususnya dalam proses peradilan, yaitu:

1. *Compassion, respect, and recognition,*
2. *Recieve information and explanation about the progress of the case;*

3. *Provide information,*
4. *Providing proper assistance,*
5. *Protection of privacy and physical safety,*
6. *Restitution and compensation,*
7. *To acces to the mechanism of justice system.*¹²⁴

Pada tahun 2010 Kepolisian Republik Indonesia meluncurkan 4 (empat) program unggulan untuk mengakselerasi *trust building*. Dua cara diantaranya dengan meningkatkan pelayanan publik dan pembersihan internal. Empat program tersebut adalah *Quick Responce*, transparansi pelayanan SIM, STNK, dan BPKB. Kemudian, transparansi rekrutmen Polri dan transparansi proses penyidikan dengan menerbitkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP).¹²⁵

SP2HP adalah surat yang diberikan kepada pelapor / pengadu tentang perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan yang ditandatangani oleh atasan penyidik dengan melalui tahapan-tahapan :

- 1) SP2HP pertama kali diberikan adalah pada saat setelah mengeluarkan surat perintah penyidikan dalam waktu 3 (tiga) hari Laporan Polisi dibuat.

¹²⁴ Didik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *op.cit.*, hal 54.

¹²⁵ Hukum Online, 08 Februari 2009, *Penerapan SP2HP Bagian Dari Evaluasi Quick Wins Polri* (Online) <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21132/penerapan-sp2hp-bagian-dari-evaluasi-iquick-winsi-polri>, (20 Januari 2013).

2) SP2HP yang diberikan kepada pelapor berisi pernyataan bahwa laporan telah diterima, nama penyidik dan nomor telepon/HP.

3) Waktu pemberian SP2HP pada tingkat penyidikan untuk kasus :

a) Kasus ringan, SP2HP diberikan pada hari ke-10, hari ke-20 dan hari ke-30

b) Kasus sedang, SP2HP diberikan pada hari ke-15, hari ke-30, hari ke-45 dan hari ke-60.

c) Kasus sulit, SP2HP diberikan pada hari ke-15, hari ke-30, hari ke-45, hari ke-60, hari ke-75 dan hari ke-90.

d) Kasus sangat sulit, SP2HP diberikan pada hari ke-20, hari ke-40, hari ke-60, hari ke-80, hari ke-100 dan hari ke-120.

e) Tahap penyelesaian dihitung pada saat penyerahan berkas perkara yang pertama.¹²⁶

Bagi negara ataupun pemerintah merupakan keharusan dan wajib hukumnya mendorong, mendukung, dan memenuhi kewajiban untuk melindungi warganya termasuk korban dan saksi (korban), sesuai perintah Undang-Undang Dasar 1945.

¹²⁶ Komnas PKPU Probolinggo, 18 Januari 2013, *Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)* (Online), <http://komnaspkpuprobolinggo.wordpress.com/2012/01/18/surat-pemberitahuan-perkembangan-hasil-penyidikan-sp2hp-2/>, 20 Januari 2013.

d. Peranan Korban

Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. Menurut Arif Gosita, salah satu latar belakang pemikiran viktimologis ini adalah “pengamatan meluas terpadu”. Menurut beliau segala sesuatu harus diamati secara meluas terpadu (makro-integral) di samping diamati secara mikro-klinis, apabila kita ingin mendapatkan gambaran kenyataan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, mengenai sesuatu, terutama mengenai relevansi sesuatu.¹²⁷

Perkembangan global, faktor ekonomi, politik, sosiologis, ataupun faktor-faktor negatif yang lain, memungkinkan adanya korban yang tidak “murni”. Di sini korban tersangkut atau menjadi bagian dari pelaku kejahatan, bahkan sekaligus menjadi pelakunya. Lebih mendalam tentang masalah ini, Hans von Hentig beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah :

- a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi,
- b. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang besar,
- c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan si korban,

¹²⁷ Arief Gosita, *op.cit...*, hal 8.

- d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban.¹²⁸

Selanjutnya, hubungan korban dan pelaku dapat dilihat dari tingkat kesalahannya. Menurut Mendelson, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi 5 (lima) macam, yaitu :

1. Yang sama sekali tidak bersalah,
2. Yang jadi korban karena kelalaiannya,
3. Yang sama salahnya dengan pelaku,
4. Yang lebih bersalah dari pelaku,
5. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).¹²⁹

Ada lagi hubungan berdasarkan hubungan dengan sasaran tindakan pelaku, yaitu sebagai berikut :

1. Korban langsung, yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran atau objek perbuatan pelaku,
2. Korban tidak langsung, yaitu mereka yang meskipun tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa.¹³⁰

¹²⁸ Bambang Waluyo, *op.cit.*, hal 19.

¹²⁹ *Ibid*, hal 19-20.

¹³⁰ G. Widiartana, *Victimologi, Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Atmajaya, 2009, Yogyakarta, hal 22.

e. **Dampak Psikologi Korban Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan**

Ditinjau dari segi ilmu bahasa, perkataan “psikologi atau psychology” ini berasal dari kata “psycho” yang sering diartikan jiwa dan perkataan “logos” yang berarti ilmu atau ilmu pengetahuan. Sehingga dengan demikian perkataan “*psychology*” sering diartikan atau diterjemahkan dengan ilmu pengetahuan tentang jiwa (ilmu jiwa).¹³¹

Dalam bahasa Yunani, kata psychology itu mengandung kata psycho yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu, sehingga istilah “ilmu jiwa” itu merupakan terjemahan belaka daripada istilah *psychology*. Walaupun demikian, namun dipergunakan kedua istilah dengan beganti-ganti dan dengan kesadaran adanya perbedaan arti yang jelas sebagai berikut :

(1) Ilmu jiwa itu merupakan istilah bahasa Indonesia sehari-hari dan yang dikenal tiap-tiap orang, sehingga menggunakannya dalam artinya yang luas dan telah lazim dipahami orang. Ilmu jiwa dipergunakan dalam arti yang lebih luas daripada istilah *psychology*. Ilmu jiwa meliputi segala pemikiran, pengetahuan, tanggapan, tetapi juga segala khayalan dan spekulasi mengenai jiwa itu.

(2) *Psychology* merupakan suatu istilah ilmu pengetahuan, suatu istilah scientific, sehingga dipergunakan untuk menunjukkan kepada pengetahuan ilmu jiwa yang bercorak ilmiah tertentu. *Psychology*

¹³¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Tentang Psikologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hal 9.

meliputi ilmu pengetahuan mengenai jiwa yang diperoleh secara sistematis dengan metode-metode ilmiah yang dimufakati sarjana-sarjana *psychology*.¹³²

Dapat disimpulkan bahwa istilah ilmu jiwa menunjukkan ilmu jiwa pada umumnya, sedangkan istilah *psychology* menunjukkan ilmu jiwa yang ilmiah menurut norma-norma ilmiah modern. Dengan demikian jelas bahwa apa saja yang disebut ilmu jiwa itu belum tentu *psychology*, tetapi *psychology* itu senantiasa juga ilmu jiwa.

Psychology itu merupakan suatu ilmu yang menyelidiki serta mempelajari tentang sikap, tingkah laku atau aktivitas-aktivitas, di mana sikap, tingkah laku merupakan manifestasi hidup kejiwaan. Jadi yang dipelajari bukanlah tingkah laku saja. Psikologi merupakan suatu disiplin yang secara sistematis mempelajari perkembangan dan yang secara sistematis mempelajari perkembangan dan berfungsinya faktor-faktor mental dan emosional manusia. Maka sebenarnya psikologi tidak hanya membatasi ruang lingkupnya pada perilaku nyata saja, melainkan juga pada perilaku tertutup, seperti berpikir, marah ataupun takut.¹³³

Di dalam kehidupan sehari-hari, karena faktor-faktor tertentu, mungkin saja manusia mengalami gangguan pada jiwanya. Dalam hal ini, para korban pengendara kendaraan bermotor yang mengalami tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Orang-orang yang mengalami hal itu, biasanya disebut sebagai orang yang mengalami “*neurosis*” dan/atau

¹³² *Ibid*, hal 9.

¹³³ *Ibid*, hal 14.

“*psikhosis*”. Seorang neurotik biasanya menampilkan gejala-gejala tertentu, seperti misalnya, kekhawatiran yang berlebih-lebihan, phobia, depresi, dan lain sebagainya. Hal ini terutama disebabkan, oleh karena penderitaanya senantiasa menonjolkan mekanisme pertahanannya yang berlebih-lebihan.¹³⁴

Keadaan-keadaan seperti khawatir terlalu berlebihan, phobia, rasa takut yang mengancam jiwa, bahkan depresi biasanya dialami oleh para korban-korban pencurian dengan kekerasan. Jika diartikan secara keseluruhan, yang dimaksud dengan :

- a. Kekhawatiran : merupakan suatu proses dimana seseorang mengalami atau menganggap dirinya terancam bahaya.
- b. Phobia : rasa takut terhadap hal-hal yang dianggap mengancam.
- c. Depresi : adanya rasa negatif terhadap diri sendiri (putus asa).¹³⁵

Hubungan antara aspek-aspek psikologis dengan hukum, baru disinggung sana sini, baik secara konsepsional dan secara abstrak. Artinya, dari segi hukum selalu dipergunakan fungsi hukum sebagai titik tolaknya. Di satu pihak aspek-aspek psikologis mempunyai pengaruh terhadap berfungsinya hukum. Namun, dipihak lain berfungsinya hukum juga dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian manusia, agar

¹³⁴ Soerjono Soekanto, *Beberapa Catatan tentang Psikologi Hukum*, Penerbit Alumni, 1979, Bandung, hal. 19.

¹³⁵ *Ibid*, hal 40.

mencapai ideal sebagai manusia yang bermental sehat.¹³⁶ Hal ini disebabkan karena hukum (untuk sebagian besar) dibentuk oleh manusia untuk mengatur manusia, agar tercipta pergaulan hidup yang merupakan refleksi dari keserasian antara ketertiban dengan ketentraman.

Penegakan hukum tidaklah sesempit “*law enforcement*” dalam maknanya. Penegakan hukum juga berarti penegakan kedamaian dalam arti luas; artinya yang pokok adalah keserasian antara ketertiban dengan ketentraman. Oleh karena itu, untuk menelaah segi-segi psikologis dalam praktek-praktek penegakan hukum, yang sedikit banyaknya lebih memperhatikan faktor ketentraman (pribadi).¹³⁷

3. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Dalam pengaturan Hukum Indonesia, korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan. Bagaimana tidak, selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik, maupun psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai suatu sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, misalnya harus kembali mengemukakan, mengingat bahkan mengulangi (merekonstruksi) kejahatan yang pernah menyimpannya pada saat sedang menjalani proses

¹³⁶ *Ibid*, hal 34.

¹³⁷ *Ibid*, hal 52.

pemeriksaan, baik di tingkat penyidikan maupun setelah kasusnya diperiksa pengadilan.¹³⁸

Keberpihakan hukum terhadap korban yang terkesan timpang jika dibandingkan dengan tersangka (terdakwa), dan dapat terlihat dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang lebih banyak memberikan hak istimewa terhadap tersangka (terdakwa) dibandingkan kepada korban.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat (di Indonesia), landasan pijak kita adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.¹³⁹

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga :”Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.”

Sedangkan perlindungan sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi-saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat

¹³⁸ Didik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *op.cit.*, hal 79.

¹³⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, 1987, Surabaya, hal 38.

penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁴⁰

Perlindungan hak-hak korban (*Victim Rights Protection*) terdiri dari segi penanganan korban (Treatment of Victim) dan Kebijakan Penanggulangan Korban. Dan kerugian yang dialami korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan biasanya berupa fisik yang mana menjurus ke luka dan cacat, nyawa yang menjurus kematian. Dan tidak lepas dari penderitaan fisik yang dialami korban yang harus dilindungi, kejiwaan atau psikis korban harus diperhatikan juga, Trauma, stress, rendah diri, dan bahkan bisa menjadi gila.

b. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Korban Kejahatan

¹⁴⁰ etd.eprints.ums.ac.id, *Pengangkutan Orang*, (Online), diakses tanggal 15 Oktober 2012.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan yang mengatur tentang perlindungan korban kejahatan melalui penggantian kerugian dapat dilihat dari pasal 14c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada intinya menyatakan: dalam hal hakim menjatuhkan pidana bersyarat, hakim dapat menetapkan syarat khusus bagi terpidana untuk mengganti kerugian, baik semua atau sebagian yang timbul akibat dari tindak pidana yang dilakukan.

Sebagaimana diketahui, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi tersangka/terdakwa, lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan.

Namun demikian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diatur beberapa hak yang dapat digunakan oleh korban kejahatan dalam suatu proses peradilan pidana, yakni:

1. Hak untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dan penuntut umum. (Pasal 77 jo 80 KUHP),
2. Hak korban berkaitan dengan kedudukannya sebagai saksi. (Pasal 168 KUHP),
3. Hak untuk menuntut ganti rugi akibat suatu tindak pidana/kejahatan yang menimpa diri korban melalui cara penggabungan perkara perdata dengan perkara pidana. (Pasal 98-101 KUHP)
4. Hak bagi keluarga korban untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi melakukan otopsi. (Pasal 134-136 KUHP)

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, bergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Sebagai contoh, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Ada beberapa bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan, antara lain:

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Pasal 35 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 menyatakan pengertian kompensasi, yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan restitusi yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

2. Konseling

Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana.

3. Pelayanan/Medis

Diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti).

4. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Di Indonesia sendiri, bantuan hukum lebih sering diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Namun, jarang dipergunakan oleh korban kejahatan karena kredibilitasnya masih dipertanyakan.

5. Pemberian Informasi

Pemberian Informasi ini berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami korban. Pemberian informasi ini memberi peranan yang sangat penting dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui informasi inilah diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan efektif.

c. Tugas dan Wewenang Polisi

Dalam menegakkan hukum pidana, Polisi sebagai unsur utama dan paling awal berhadapan dengan kejahatan dan pelaku kejahatan, melaksanakan kegiatan penanggulangan kejahatan untuk mewujudkan situasi kamtibmas terkendali, dalam wadah kelembagaan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).¹⁴¹

Khusus mengenai peran Polri dinyatakan dalam Tap MPR sebagai berikut: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Mengenai posisi Polri, selanjutnya, dinyatakan dalam salah

¹⁴¹ Soerjono Soekanto, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor*, Bina Aksara, Jakarta, 1988, hal 25.

satu konsideran Tap MPR tersebut bahwa TNI dan Polri merupakan lembaga yang setara kedudukannya.¹⁴²

Polisi sebagai salah satu unsur utama sistem peradilan pidana merupakan pranata sosial yang melaksanakan fungsi pengadilan sosial. Keseluruhan fungsi tersebut baik sebagai unsur sistem peradilan pidana ataupun alat pengendalian sosial berkaitan dengan peranan pokok Polisi dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan. Dengan demikian bekerjanya Polisi di dalam masyarakat senantiasa pada satu pihak bertolak dari aturan-aturan hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku, sedang pada pihak lain melakukan penegakan hukuman dalam bentuk reaksi sosial formal terhadap kejahatan.¹⁴³

Secara universal, peran polisi dalam masyarakat dirumuskan sebagai penegak hukum (*law enforcement officers*), pemelihara ketertiban (*order maintenance*). Peran tersebut di dalamnya mengandung pula pengertian polisi sebagai pembasmi kejahatan (*crime fighters*). Namun di dalam negara yang sistem politiknya otoriter, makna peran polisi sebagai alat penegak hukum direduksi menjadi alat kekuasaan. Sebagai akibatnya, keberadaan polisi bukannya dekat dan melindungi masyarakat, melainkan sebaliknya berada jauh dari rakyat, dan justru berhadapan dengan rakyatnya. Sementara di negara demokratis, polisi harus transparan dan bukan membela kekuasaan. Oleh karenanya pengawasan terhadap lembaga yang memiliki alat kekerasan ini mesti dilakukan oleh rakyat, lewat badan independen yang menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Untuk dapat memahami dan mengadakan penilaian bekerjanya Polisi, maka dapat dilihat dari tiga aspek sebagai berikut :

¹⁴² Tap MPR No. VII.MPR/2000, item (g), tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁴³ *Ibid*, hal 12.

1. Sifat dan luas kejahatan dalam masyarakat baik yang dilaporkan dan dicatat oleh Kepolisian ataupun yang diketahui melalui mass media atau cara lain seperti survey korban dan lain-lain,
2. Lingkungan tempat polisi beroperasi, termasuk di dalamnya sikap dan pandangan masyarakat tentang derajat keseriusan kriminalitas serta citra Polisi dan sumberdaya-sumberdaya masyarakat,
3. Faktor- faktor intern Kepolisian yang meliputi struktur organisasi, manajemen administrasi, alokasi dan distribusi tenaga, sistem pendataan informasi dan komunikasi, kesinambungan operasi-operasi lapangan (patroli, pengawasan, penyelidikan), serta hubungan dengan instansi lain.¹⁴⁴

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang nomor 13 tahun 1961, tugas-tugas Kepolisian Negara adalah :

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan , dan mengusahakan ketaatan warga masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.

¹⁴⁴ *Ibid* hal. 13

- b. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan hukum secara pidana dan lain-lain pertaruan negara.
- c. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
- d. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu perusahaan negara.¹⁴⁵

Di samping tugas-tugas yang telah disebutkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia adalah penyelidik dan penyidik. Sebagai penyelidik maka Polisi berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.¹⁴⁶

Berdasarkan rumusan Tugas Pokok Polri yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

- a. Selaku alat Negara Penegak Hukum memelihara serta meningkatkan tertib Hukum,
- b. Selaku alat Negara yang memelihara stabilitas Kamdagri,

¹⁴⁵ *Ibid* hal. 27

¹⁴⁶ *Ibid*, hal. 27-28

- c. Melaksanakan Tugas-tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Pelindung, Pengayom dan Pelayan masyarakat bagi tegaknya peraturan perundang-undangan,
- d. Bersama-sama dengan komponen Instansi Pemerintahan lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah Negara Republik Indonesia guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat,
- e. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan Pemerintah maupun Swasta untuk kepentingan bersama,
- f. Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh Undang-undang serta pemerintah.¹⁴⁷

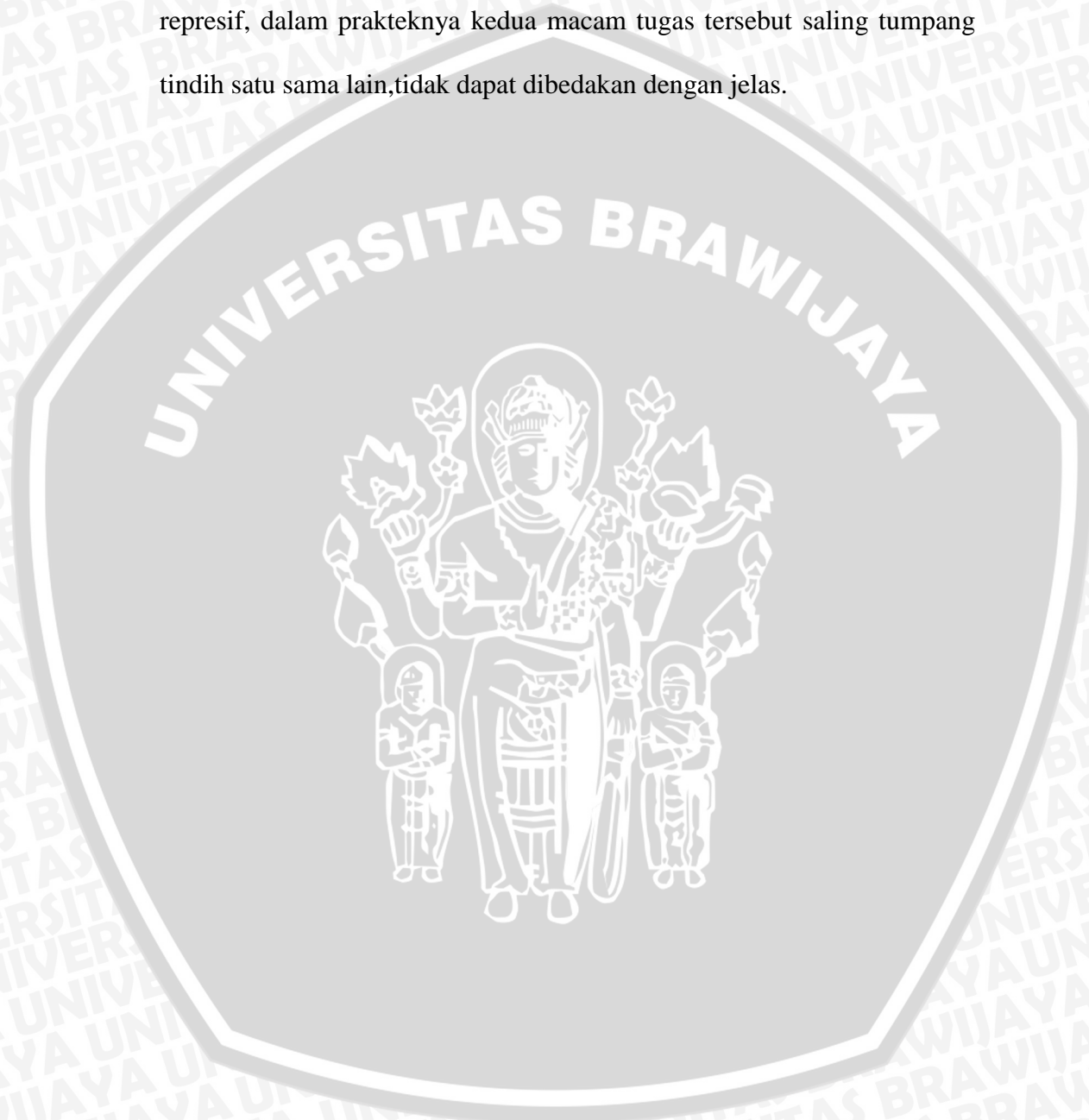
Secara lebih terperinci Gerson W. Bawengan, membagi tugas Polisi sebagai berikut :

1. Tugas Preventif, berupa patroli-patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur, mengadakan tanya jawab dengan orang lewat, termasuk usaha pencegahan kejahatan atau pelaksanaan tugas preventif, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
2. Tugas Represif, menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan perkara dan bahkan berusaha untuk menemukan kembali barang-barang hasil curian, melakukan penahanan untuk kemudian diserahkan ke

¹⁴⁷ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

tangan kejaksaan yang kelak akan meneruskannya ke Pengadilan.¹⁴⁸

Walaupun dibedakan antara tugas-tugas yang bersifat preventif dan represif, dalam prakteknya kedua macam tugas tersebut saling tumpang tindih satu sama lain, tidak dapat dibedakan dengan jelas.



¹⁴⁸ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hal 28.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian *yuridis-empiris*, yaitu penelitian terhadap keadaan nyata dan faktual yang ada dalam masyarakat atau pada lapangan.¹⁴⁹ Penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi korban pengendara kendaraan bermotor yang mengalami tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

B. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan *yuridis-sosiologis*, yaitu metode pendekatan yang mengkaji terhadap asas-asas dan sistematika hukum serta bagaimana identifikasi dan efektifitas hukum tersebut dalam masyarakat.¹⁵⁰ Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui hak-hak yang didapatkan oleh korban berikut perlindungan hukum apa saja yang diberikan kepada para korban dan upaya-upaya serta kendala Kepolisian Resor Pasuruan dalam mencegah tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Dalam hal ini pendekatan yuridis yang digunakan untuk memahami serta menggambarkan permasalahan yang menyangkut

¹⁴⁹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal 15-16.

¹⁵⁰Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 42.

peraturan perundang-undangan dalam hubungannya dengan perlindungan korban pengendara kendaraan bermotor yang mengalami tindak pidana

pencurian dengan kekerasan. Sedangkan pendekatan sosiologis yang dilakukan yaitu dengan melakukan studi langsung di Kepolisian Resor Pasuruan. Dengan tujuan untuk mengkaji dan membahas permasalahan dari aspek sosialnya yaitu realita perlindungan hukum bagi korbannya dan menganalisis kendala-kendala Kepolisian Resor Pasuruan dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan berikut upaya-upaya penanggulangannya.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di Kepolisian Resor Pasuruan. Adapun pertimbangan peneliti memilih lokasi tersebut adalah:

- a. Kepolisian Resor Pasuruan dengan dasar pertimbangan dapat mendapatkan data dan informasi yang seluas-luasnya karena menangani kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan .
- b. Pra survei yang dilakukan mendapatkan data bahwa di Kepolisian Resor Pasuruan terdapat 10 kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan selama periode Januari-September 2012 .¹⁵¹

D. Jenis Data

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden.¹⁵² Adapun data primer disini diperoleh dari para

¹⁵¹ Data Kriminalitas Kepolisian Resor Pasuruan dan Jajaran Kepolisian Sektor Sukorejo yang diambil pada tanggal 08 Oktober 2012.

¹⁵² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal 91.

korban-korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan dari Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Pasuruan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka atas berbagai penelitian yang ada sebelumnya yang dapat berbentuk laporan penelitian seperti skripsi dan buku-buku literatur serta semua komponen tersebut tentunya relevan dengan tema dalam penelitian ini.¹⁵³ Adapun data sekunder disini berasal dari dokumen-dokumen yang ada di Kepolisian Resor Pasuruan serta data yang diperoleh dari data hasil penelitian, penulisan skripsi, melalui studi kepustakaan atau literatur, penelusuran situs di internet, peraturan perundang-undangan dari berbagai sumber dan pendapat-pendapat ahli hukum.

E. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian dan penyusunan penulisan ini, peneliti memerlukan sumber data yang diperoleh dari:

a. Sumber Data Primer berasal dari:

Penelitian lapangan yaitu pengumpulan data secara langsung dan mencari segala informasi yang terkait dengan masalah yang diteliti melalui metode wawancara dan pengamatan langsung antara Penulis dengan korban-korban pengendara kendaraan bermotor yang mengalami tindak pidana pencurian

¹⁵³ Abdulkalir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

dengan kekerasan dan Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Pasuruan.

b. Sumber Data Sekunder berasal dari:

Penelitian Kepustakaan yaitu metode penelitian dan pengumpulan data melalui kepustakaan berdasarkan data-data yang diperoleh dari data statistik dari Kepolisian Resor Pasuruan, buku-buku dari PDIH, buku-buku dari perpustakaan pusat, pendapat para sarjana dan peraturan perundang-undangan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, PP No. 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat, dan TAP MPR No. VII.MPR/2000, item (g) Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik pengambilan data:

a. Pengumpulan Data Primer

Pengambilan data primer akan peneliti lakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan responden dengan menggunakan pedoman wawancara terbuka yaitu korban-korban dan Kepala

Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Pasuruan secara bebas memberikan jawaban dan penulis yang akan mengklasifikasi sendiri.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Pengambilan data sekunder akan peneliti lakukan dengan melakukan studi kepustakaan yaitu dengan membaca, mengutip, menyalin, membrowsing dan menganalisa peraturan perundang-undangan, artikel, buku yang berkaitan dengan permasalahan baik melalui media cetak maupun elektronik dan akses internet.

G. Populasi, Sampel dan Responden

a. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala kegiatan atau seluruh unit yang diteliti.¹⁵⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah korban-korban pengendara kendaraan bermotor yang mengalami tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan petugas Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Pasuruan.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.¹⁵⁵ Dalam penelitian ini mengambil sampel dengan cara *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini melakukan wawancara dengan peutgas Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Pasuruan Iptu Riyanto, S.H..

¹⁵⁴ Ronny Hanintijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jumetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988, hal 44.

¹⁵⁵ *Ibid*, hal 122.

c. Responden

Responden adalah penjawab (atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian).¹⁵⁶ Responden dalam penelitian ini adalah:

1. Kasat Reskrim : 1 orang
2. Korban : 4 orang

H. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif (*Deskriptif Analysis*) yaitu dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang relevan.¹⁵⁷

Data yang diperoleh dari penelitian tentang Kajian Viktimologi tentang Perlindungan Hukum bagi Korban Pengendara Kendaraan Bermotor yang Mengalami Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan, kemudian dianalisis dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan terutama tentang perlindungan hukum bagi korban pengendara kendaraan bermotor yang mengalami tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

¹⁵⁶ Anonim, 2012, *Pegertian Responden (online)*, <http://www.elbirtus.htm>, (diakses 1 Oktober 2012).

¹⁵⁷ Burhan Ashshofa, *Op.Cit*, hal 91.

I. Definisi Operasional

- a. Kajian Viktimologi adalah Ilmu yang mempelajari korban kejahatan sebagai fenomena sosial dan hukum.
- b. Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.
- c. Korban Pencurian dengan Kekerasan adalah korban tindak pidana yang mengalami penderitaan baik secara fisik, mental, dan kerugian ekonomi.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian

1. Letak Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pasuruan

Kepolisian Resor Pasuruan adalah sebuah lembaga yang mempunyai tugas untuk menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Demi terciptanya tujuan tersebut pihak kepolisian bekerja sama antara satu dengan yang lain. Markas Kepolisian Resor Pasuruan terletak di Jalan Dr. Sutomo nomor 4, Bangil, Pasuruan.¹⁵⁸ Kepolisian Resor Pasuruan mempunyai wilayah kerja yang cukup luas dengan membawahi 17 Kepolisian Sektor atau Polsek, yaitu : Kepolisian Sektor Purwodadi, Kepolisian Sektor Tukur, Kepolisian Sektor Puspo, Kepolisian Sektor Tosari, Kepolisian Sektor Lumbang, Kepolisian Sektor Pasrepan, Kepolisian Sektor Kejayan, Kepolisian Sektor Wonorejo, Kepolisian Sektor Purwosari, Kepolisian Sektor Prigen, Kepolisian Sektor Sukorejo, Kepolisian Sektor Pandaan, Kepolisian Sektor Gempol, Kepolisian Sektor Beji, Kepolisian Sektor Bangil, Kepolisian Sektor Rembang, Kepolisian Sektor Winongan.¹⁵⁹

FAKTA-FAKTA (ASTRA GATRA) ;

a. GEOGRAFIS

1. Letak geografis wilayah Dati II Kabupaten Pasuruan berada antara :

112,30" s/d 113'30 menit Bujur Timur dan

¹⁵⁸ Diakses melalui web (Online), www.polres-pasuruan.com, 13 Maret 2013

¹⁵⁹ Data Sekunder dari Kepolisian Resor Pasuruan 2013, diolah

7.30" s/d 8.30" Lintang Selatan.

2. Letak wilayah hukum Polres Pasuruan yang meliputi 17 wilayah Kecamatan di Kabupaten Pasuruan bisa dilihat dari segi ekonomi sangat strategis karena terletak pada jalur ekonomi :

Surabaya – Jember/ Banyuwangi/ Bali.

Surabaya – Malang dan

Malang – Jember/ Banyuwangi/ Bali.

3. Luas Wilayah : 47.401 KM²

4. Batas Administratif :

Utara : Kabupaten Sidoarjo dan Selat Madura.

Timur : Kabupaten Probolinggo.

Selatan : Kabupaten Malang.

Barat : Kabupaten Mojokerto.

b. GEOLOGIS

Daratan wilayah Kabupaten Pasuruan terbagi menjadi 3 bagian :

1. Daerah Pegunungan dan Berbukit dengan ketinggian antara 180 s/d 3000 meter.

Daerah ini membentang dibagian Selatan dan Barat meliputi :

- a. Kecamatan Lumbang,
- b. Kecamatan Puspo,
- c. Kecamatan Tosari,
- d. Kecamatan Tutur,
- e. Kecamatan Purwodadi,

- f. Kecamatan Prigen,
- g. Kecamatan Gempol.
2. Daerah Dataran Rendah dengan ketinggian antara 6 s/d 91 meter.
- Dataran rendah ini berada di bagian tengah merupakan daratan yang subur.
3. Daerah Pantai dengan ketinggian antara 2 s/d 8 meter diatas permukaan air laut.
- Daerah ini membentang dibagian Utara yaitu hanya meliputi 1 wilayah saja yaitu Kecamatan Bangil, sedangkan 3 Kecamatan di wilayah Kabupaten Pasuruan yang masukdalam wilayah hukum Polresta Pasuruan ada 3 kecamatan yaitu Lekok, Kecamatan Rejoso, dan Kecamatan Kraton.
4. Keadaan Cuaca :
- Curah hujan mulai bulan November s/d Juni = 27 s/d 520 mm.
- Musim Kemarau mulai bulan Juni s/d Oktober = 1 s/d 27 mm.
- Suhu udara rata-rata 8' C s/d 29,9' C.
- Kecepatan angin rata-rata 2,94 Km/Jam s/d 10,56 Km/Jam.
5. Keadaan Tanah :
- Keadaan Tanah daerah pesisir pantai utara dengan ketinggian 2 M s/d 8 M , dataran rendah dengan ketinggian antara 6 s/d 91 M, daerah pegunungan/ bukit antara 186 s/d 1.161 M dari permukaan air laut dengan kemiringan tanah 0 s/d 45' melandai dari daerah sebelah Selatan ke Utara.¹⁶⁰

¹⁶⁰ *Ibid*

2. Struktur Organisasi Kepolisian Resort Kabupaten Pasuruan.

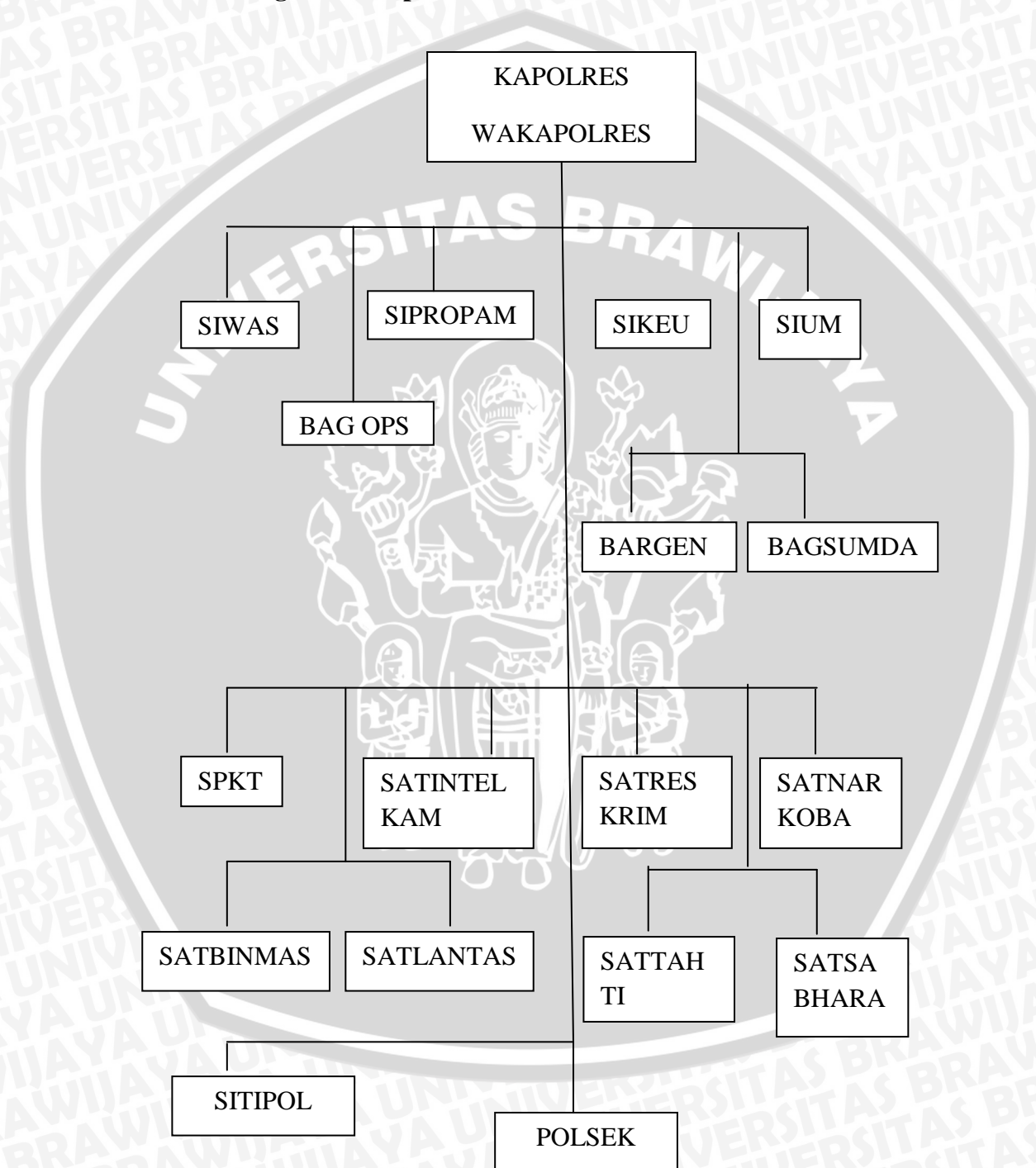
Sebagai suatu lembaga yang menjalankan kewajibannya demi tercipta keamanan dan ketertiban, maka Kepolisian Resor Pasuruan memiliki susunan struktur organisasi yang membagi tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepolisian antara yang satu dengan yang lain supaya tidak menyebabkan adanya tumpang tindih dalam menjalankan segala kewajibannya itu.

Mengenai struktur organisasi Kepolisian Resor sesuai dengan Intelijen Dasar Polres Pasuruan Nomor : R/IDA/ 01/ I / 2013 IK Tanggal : 01 Januari 2013 yaitu sebagai berikut :



Bagan I

Struktur Organisasi Kepolisian Resor Pasuruan



Sumber : Data sekunder dari Kepolisian Resor Pasuruan, diolah, 2013

Keterangan Struktur organisasi Kepolisian Resor Pasuruan¹⁶¹:

1. Kepala Kepolisian Resor (Kapolres)

adalah pimpinan Kepolisian Resor (Polres) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Polisi Daerah (Kapolda). Kepala Kepolisian Resor bertugas memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan-satuan organisasi di lingkungan Kepolisian Resor dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya, serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kepala Polisi Daerah (Kapolda).

2. Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres)

adalah pembantu utama Kepala Kepolisian Resor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Resor dalam melaksanakan tugas-tugas seluruh satuan organisasi Kepolisian Resort dalam hal Kepala Kepolisian Resor berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kepala Kepolisian Resor.

3. Bagian Operasional (Bagops)

adalah unsur pembantu pimpinan Kepolisian Resor yang berada di bawah Kepala Kepolisian Resor. Bagops bertugas merencanakan, mengendalikan, dan menyelenggarakan administrasi operasi kepolisian, termasuk latihan pra operasi, melaksanakan koordinasi baik dalam rangka keterpaduan fungsi maupun dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat, serta melaksanakan fungsi

¹⁶¹ Hasil Data dari Intelijen Dasar Polres Pasuruan Nomor : R/IDA/ 01/ I / 2013 IK

hubungan masyarakat termasuk Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID).

4. Bagian Perencanaan (Bagren)

adalah unsur pembantu pimpinan Kepolisian Resor yang berada di bawah Kepala Kepolisian Resor. Bagren bertugas menyusun rencana kerja dan anggaran, pengendalian program dan anggaran serta analisa dan evaluasi atas pelaksanaannya, termasuk rencana program pengembangan satuan Kewilayahan.

5. Bagian Sumber Daya Uang (Bagsumda)

adalah unsur pembantu pimpinan Kepolisian Resor yang berada di bawah Kepala Kepolisian Resor. Bagsumda bertugas menyelenggarakan pembinaan dan administrasi personel, pelatihan fungsi, dan pelayanan kesehatan, pembinaan, dan administrasi logistik serta pelayanan bantuan dan penerapan hukum.

6. Seksi Pengawasan (Siwas)

adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan Kepolisian Resor yang berada di bawah Kepala Kepolisian Resor. Siwas bertugas menyelenggarakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidentil terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan oleh semua unit kerja khususnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian rencana kerja, termasuk bidang material, fasilitas dan jasa serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.

7. Seksi Pertanggung jawaban Profesi dan Pengamanan Internal (Sipropam)

adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan Kepolisian Resor yang berada di bawah Kepala Kepolisian Resor. Sipropam bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Kepolisian Republik Indonesia, pembinaan disiplin dan tata tertib, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakkan disiplin dan pemuliaan profesi.

8. Seksi Keuangan (Sikeu)

adalah unsur pembantu pimpinan Kepolisian Resor yang berada di bawah Kepala Kepolisian Resor. Sikeu bertugas menyelenggarakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan dan akuntansi, pelaporan serta pertanggung jawaban keuangan.

9. Seksi Umum (Sium)

adalah unsur pembantu pimpinan Kepolisian Resort yang berada di bawah Kepala Kepolisian Resor. Sium bertugas menyelenggarakan terjaminnya pelayanan administrasi dan kelancaran tugas-tugas pimpinan yang mencakup fungsi kesekretariatan, kearsipan, dan administrasi umum lainnya serta pelayanan markas di lingkungan Kepolisian Resor.

10. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)

adalah unsur pelaksana tugas pokok Kepolisian Resor yang terdiri dari 3 (tiga) unit dan disusun berdasarkan pembagian waktu (ploeg) yang berada di bawah Kepala Kepolisian Resor. SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayan bantuan/pertolongan kepolisian,

bersama fungsi terkait TKP untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan olah TKP sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

11. Satuan Inteljen Keamanan (Satintelkam)

adalah unsur pelaksana tugas pokok Kepolisian Resor yang berada di bawah Kepala Kepolisian Resor. Satintelkam bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Inteljen bidan keamanan, termasuk perkiraan Inteljen, persandian, pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin/keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api, dan bahan peledak, kegiatan sosial politik masyarakat dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) kepada masyarakat serta melakukan pengamanan, pengawasan terhadap pelaksanaannya.

12. Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim)

adalah unsur pelaksana tugas pokok Kepolisian Resor yang berada di bawah Kepala Kepolisian Resor. Satreskrim bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara transparan dan akuntabel dengan penerapan SP2HP, memberikan pelayanan dan perlindungan khusus terhadap korban dan pelaku anak dan wanita, menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, dan pengawasan PPNS baik dibidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan.

13. Satuan Narkoba (Satnarkoba)

Adalah unsur pelaksana tugas pokok Kepolisian Resor yang berada di bawah Kepala Kepolisian Resor. Satnarkoba bertugas menyelenggarakan atau membinaa fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba, serta koordinasi dalam rangka pembinaan, pencegahan, rehabilitasi korban dan penyalahgunaan Narkoba.

14. Satuan Pembinaan Masyarakat (Sabtinmas)

adalah unsur pelaksana tugas pokok Kepolisian Resor yang berada di bawah Kepala Kepolisian Resor. Sabtinmas bertugas menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi pembinaan teknis Polisi masyarakat dan kerja sama dengan instansi pemerintah/lembaga/organisasi masyarakat, pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa serta pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka memberdayakan upaya pencegahan masyarakat terhadap kejahatan serta meningkatkan hubungan sinergitas Polisi Republik Indonesia masyarakat.

15. Satuan Samapta Bhayangkara (Satsabhara)

adalah unsur pelaksana tugas pokok Kepolisian Resor yang berada di bawah Kepala Kepolisian Resor. Satsabhara bertugas menyelenggarakan/membinaa fungsi Samapta Bhayangkara, yang mencakup tugas Polisi umum, yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan objek vital, pengambilan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP), penanganan tindak pidana ringan, pengendalian massa, dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

16. Satuan Lalu Lintas (Satlantas)

Adalah unsur pelaksana tugas pokok Kepolisian Resor yang berada di bawah Kepala Kepolisian Resor. Satlantas berfungsi menyelenggarakan dan membina fungsi lalu lintas kepolisian yang meliputi penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dibidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

17. Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti)

adalah unsur pelaksana tugas pokok Kepolisian Resor yang berada di bawah Kepala Kepolisian Resor. Sattahti bertugas menyelenggarakan pelayanan perawatan dan kesehatan tahanan, termasuk pembinaan jasmani dan rohani, serta menerima, menyimpan, dan memelihara barang bukti yang didukung dengan penyelenggaraan administrasi umum yang terkait sesuai bidang tugasnya.

18. Seksi Teknologi Informatika Kepolisian (Sitipol)

adalah unsur pendukung Kepolisian Resor yang berada di bawah Kepala Kepolisian Resor. Sitipol bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan teknologi informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal, dan pelayanan multimedia.

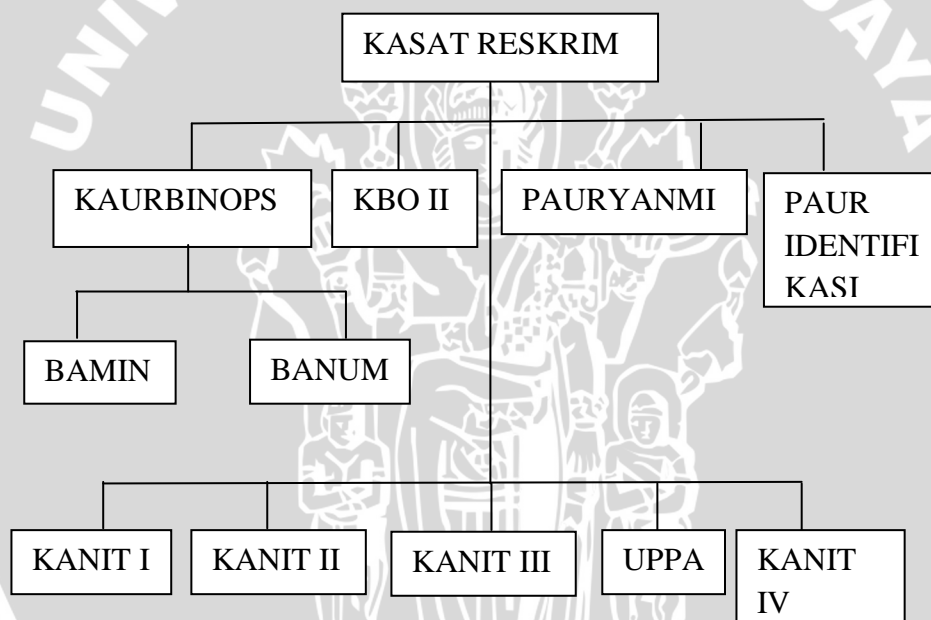
19. Kepolisian Sektor (Polsek)

adalah unsur pelaksana tugas kewilayahan Kepolisian Resor yang berada di bawah Kepala Kepolisian Resor. Kepolisian Resor bertugas

menyelenggarakan tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Kepolisian Republik Indonesia lain dalam wilayah hukumnya.

Bagan 2

Struktur Organisasi Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Pasuruan



Sumber : Data sekunder dari Kepolisian Resor Pasuruan, diolah, 2013.

Keterangan struktur organisasi Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor

Pasuruan:

1. Kepala Satuan Reserse Kriminl (KASAT RESKRIM) bertugas sebagai berikut :
 - a. Menyelenggarakan/membina urusan administrasi dan ketatausahaan serta operasional unit-unit tentang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
 - b. Memberi pelayanan/perlindungan kepada korban atau pelaku tindak pidana khususnya remaja, anak, wanita.
 - c. Memberi saran dan pendapat kepada pimpinan terkait dengan penanganan perkara tindak pidana.
2. Kepala Urusan Pembinaan Operasional (KAUR BIN OPS) yang bertugas sebagai wakil dari Kepala Satuan Reserse Kriminal. Dalam hal ini dibantu oleh Bintara Administrasi (BAMIN) dan Bantuan Umum (BANUM). Kepala Bidang Operasional (KBO), bertugas berkaitan dengan tata usaha dan administrsi yang berhubungan dengan penyidikan, serta bertugas mengawasi penyidikan pada masing-masing unit.
3. Kepala Urusan Pelayanan Administrasi (KAUR YAN MIN). Warsitu yang bertugas mengatur penyelenggaraan dukungan administrasi pelaksanaan tugas operasional Reserse Kriminal dan pelayanan administrasi untuk umum.

4. Kepala Urusan Identifikasi tugasnya membantu penyidik dalam mengungkap tindak pidana, menangani identifikasi seperti : olah TKP, *dactiloscropy*, dokumentasi tersangka.

Peneliti mendapatkan keterangan untuk penelitiannya dari Satuan Reserse Kriminal Pasuruan.

3. Data Kriminalitas Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pasuruan.

Banyaknya kasus tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Pasuruan selama periode Januari-September 2012 bisa dilihat melalui tabel dibawah ini :



Tabel I

Data Kasus Pencurian dengan Kekerasan Polres dan Polsek Jajaran

Polres Pasuruan Tahun 2012


| NO | TANGGAL & WAKTU KEJADIAN | JUMLAH | | URAIAN KEJADIAN | TINDAKAN YG DILAKUKAN RESKRIM |
|----|------------------------------|--|--|---|---|
| | | KORBAN | PELAKU | | |
| 1 | 02 Januari 2012 11.30 WIB | Hasiah, 47 tahun, Buruh Tani. | 1. Subandriyo, 30 tahun. 2. Sunardi (belum tertangkap) | Pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan / jambret perhiasan emas berupa kalung emas yang dipakai di leher korban yang sedang berjalan kaki di pinggir jalan. Lokasi kejadian di Pinggir JL. Raya Dsn. Bakalan Kec. Purwosari Kab. Pasuruan. | -Memeriksa saksi-saksi -Memeriksa tersangka -Melakukan penyidikan lebih lanjut |
| 2 | 05 Januari 2012 04.30 WIB | Legimin, 49 tahun, Swasta/Sopir. | (belum terungkap) | 3 orang pelaku memndempetkan sepeda mootor ke arah korban dan | -Memeriksa saksi-saksi -Melakukan penyidikan lebih lanjut |

| | | | | | |
|----|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|--|
| | | | | salah satu pelaku membawa senjata tajam berupa clurit yang langsung membacok korban mengenai kepala belakang dan berhasil merampas kendaraan korban. Lokasi kejadian berada di Jl. Raya Malang-Pasuruan. | |
| 3 | 20 Januari 2012 21.00 WIB | Samsul Huda, 22 tahun | Mustopa, 25 tahun | Pelaku memberhentikan kendaraan korban dan menumpang di sepeda motor korban. Selanjutnya pelaku mengalungkan clurit ke leher korban, hingga korban berhenti, karena berniat berontak, jempol kanan korban teriris. Lokasi kejadian di jalan Dsn. Bandrek Ds. Mojotengah Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan. | -Memeriksa saksi-saksi -Memeriksa tersangka -Melakukan penyidikan lebih lanjut |
| 4. | 17 April 2012 05.15 WIB | Fajar Fakhur, 18 tahun, | (belum terungkap) | Pelaku memepet sepeda motor korban dari dari sebelah kanan | -Memeriksa saksi-saksi -Melakukan penyidikan |

| | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|---|--|
| | | Mahasiswa Universitas Brawijaya | | sehingga kendaraanya berhenti dan keluar dari jalan aspal. Selanjutnya pelaku turun, mengeluarkan dan membacokkan clurit sehingga mengenai punggung korban dan berhasil merampas kendaraanya. Korban pun lari ke pemukiman setempat. Lokasi kejadian di Jl. Raya Surabaya-Malang (penanjakan), Ds. Sengonagung Kec. Purwosari Kab. Pasuruan | lebih lanjut |
| 5 | 09 Mei 2012 05.30 WIB | Mustaji, 50 tahun, Pekerja Swasta | (belum terungkap) | 2 orang pelaku memepet kendaraan korban dari sebelah kanan dan mencabut kunci kontak. Pelaku yang berada dibelakangnya turun dan langsung memukulkan clurit ke helm korban sampai | -Memeriksa saksi-saksi -Melakukan penyidikan lebih lanjut |

| | | | | | |
|---|--------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | | | terjatuh. Lalu, merampas kendaraan korban. Lokasi kejadian di Jl. Raya Surabaya-Malang (penanjakan Sengon Agung Purwosari) Kec. Purwosari, Kab. Pasuruan. | |
| 6 | 21 Mei 2012 14.00 WIB | Arif Wahyudi, 33 tahun, Pekerja Swasta | (belum terungkap) | 3 orang pelaku mengendarai kendaraanya dan berpura-pura mendekati pelaku untuk meminjam korek api. Ketika korban berhenti, seketika itu juga pelaku menyerang korban dengan clurit, korban melarikan diri dan para pelaku berhasil merampas kendaraanya. Lokasi kejadiannya di Jl. Raya Tamandayu Dsn. Panjangrum Kec. Sukorejo, Kab. Pasuruan. | -Memeriksa saksi-saksi -Melakukan penyidikan lebih lanjut |
| 7 | 31 Mei 2012 05.10 WIB | Irul, 20 tahun, Mahasiswa | (belum terungkap) | 3 orang pelaku mengendarai 2 sepeda motor, salah satu | -Memeriksa saksi-saksi -Melakukan penyidikan |

| | | | | | |
|---|---------------------------|---|-------------------|---|--|
| | | Universitas Airlangga. | | kendaraan dibuat untuk memepet kendaraan korban dan mencabut kunci kontaknya. Setelah kendarannya berhenti, pelaku mengeluarkan clurit dan mengarahkannya ke korban. Korban pun lari dan pelaku berhasil mengambil kendaraan korban. Lokasi kejadiannya di Jl. Raya Surabaya-Malang tepatnya sebelah selatan Lap. PT. Multi Breeder Kab Pasuruan. | lebih lanjut |
| 8 | 25 Juni 2012 04.30 WIB | Pandri Sulistiyo, 29 tahun, Pekerja Swasta. | (belum terungkap) | Pelaku memepet kendaraan korban dan mencabut kunci kontak. Pelaku lalu mengancam korban akan membacoknya sehingga korban kabur. Pelaku berhasil merampas kendaraan korban. | - Memeriksa saksi-saksi - Melakukan Penyelidikan lebih lanjut |

| | | | | | |
|---|---------------------------|-----------------------------|----------------------|--|--|
| | | | | Lokasi kejadiannya di Jl. Raya Pasuruan-Malang tepatnya di pertigaan beringin Kec. Purwosari, Kab. Pasuruan. | |
| 9 | 26 Juli 2012 05.30 WIB | Nasution, 34 tahun, PNS. | (belum terungkap) |  <p>4 orang pelaku mengendarai 2 kendaraan bermotor dan menyerang pelaku dengan cara memepet kendaraan korban dan menendangnya sehingga terjatuh. Setelah itu pelaku mengeluarkan golok untuk mengancam korban, karena takut korban pun lari. Pelaku pun berhasil merampas kendaraan korban. Lokasi kejadiannya di Jl. Raya Sengonagung-Bakalan tepatnya pinggir sawah termasuk Dsn. Pucanganom, Kec. Purwosari, Kab. Pasuruan.</p> | <p>- Memeriksa saksi-saksi</p> <p>-Melakukan penyelidikan lebih lanjut</p> |

| | | | | | |
|----|--------------------------------|---|----------------------|---|--|
| 10 | 18 September 2012 21.30 WIB | Subianto, 20 tahun, Pekerja Swasta. | (belum terungkap) | Pelaku memepet kendaraan korban dan berhasil mengambil kunci kontak dan selanjutnya korban diancam menggunakan clurit agar turun dari kendaraanya. Setelah itu pelaku merampas kendaraan korban. Lokasi kejadiannya di Jl. Raya Surabaya-Malang tepatnya di penanjakan Sengon Agung Kec. Purwosari, Kab. Pasuruan. | - Memeriksa saksi-saksi -Melakukan Penyelidikan lebih lanjut |
|----|--------------------------------|---|----------------------|---|--|

(Sumber : Data Sekunder dari Kepolisian Resor Pasuruan, diolah, 2013)

Keterangan dan hasil analisis dari Data Kasus Pencurian dengan Kekerasan Polres dan Jajaran Polsek Pasuruan Tahun 2012 :

1. Korban Ny.Hasiah

Pelaku dilakukan lebih dari dua orang yakni oleh Subandriyo dan Sunardi. Melihat dari jumlah pelakunya yang dilakukan lebih dari satu orang termasuk pemberatan Penyertaan atau *Deelneming*. Penyertaan ini diatur dalam Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maka dari itu dikenakan Pasal 365 ayat 2 KUHP, dikarenakan terdapat unsur khusus yang bersifat alternatif yakni dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

2. Korban Legimin

Berdasarkan keterangan yang diungkapkan oleh korban, pelaku berjumlah 3 orang dan menggunakan clurit sebagai alat untuk melakukan kekerasan terhadap korban. Disertai dengan adanya penyertaan dari jumlah pelaku itu sendiri, juga dengan adanya senjata atau alat yang digunakan untuk menuntaskan aksi kejahatannya serta menimbulkan luka terhadap korban. Kasus Legimin ini dikenakan Pasal 365 ayat 2 yang diperberat dengan dilakukannya perbuatan tersebut oleh dua orang atau lebih. Selain itu, menimbulkan luka berat yang dialami oleh korban.

3. Korban Samsul Huda

Kejadiannya dilakukan pada malam hari, dan disertai dengan alat tambahan berupa clurit dalam melakukan aksinya. Maka dari itu dikenakan pemberatan yang berupa, kejadian tersebut dilakukan pada

malam hari, di jalan umum, dan juga menggunakan upaya kekerasan untuk mempermudah, dan juga menimbulkan luka terhadap korban.

4. Korban Mustaji

Pelaku berjumlah dua orang, dan mecabut kunci kontak kendaraan korban, lalu disertai dengan ancaman kekerasan berupa adanya senjata tajam untuk mempermudah melakukan kejahatan tersebut. Penyertaan, dan pemberatan menjadi unsur tambahan dalam kasus pencurian dengan kekerasana ini.

5. Korban Arif Wahyudi

Pelaku yang berjumlah 3 orang ini mencoba meminjam korek api kepada korban, dan ketika korban berhenti pelaku langsung mengeluarkan clurit untuk memberikan ancaman terhadap korban agar menyerahkan kendaraannya. Unsur penyertaan disertai ancaman kekerasan ini termasuk kejahatan pencurian dengan kekerasan.

6. Korban Pandri Sulistiyo

Pelaku yang menggunakan ancaman kekerasan berupa ancaman akan membacok korban jika tidak menyerahkan kendaraannya ini termasuk pencurian dengan kekerasan.

7. Korban Nasution

Pelaku berjumlah 4 orang ini menggunakan ancaman sebagai cara untuk mempermudah dan melarikan diri sehingga korban tidak berdaya dan menyerahkan kendaraannya.

8. Korban Subiantono

Kejadian tersebut terjadi pada waktu malam hari dan berada di jalan umum, korban yang pada saat itu diancam menggunakan clurit oleh pelaku akhirnya kabur untuk menyelamatkan diri dan meninggalkan kendaraanya. Karena hanya dilakukan oleh satu orang pelaku, maka hanya dikenakan pemberatan berupa adanya ancaman kekerasan dan juga ditambah unsur khusus yang berupa alternatif karena dilakukan pada malam hari.

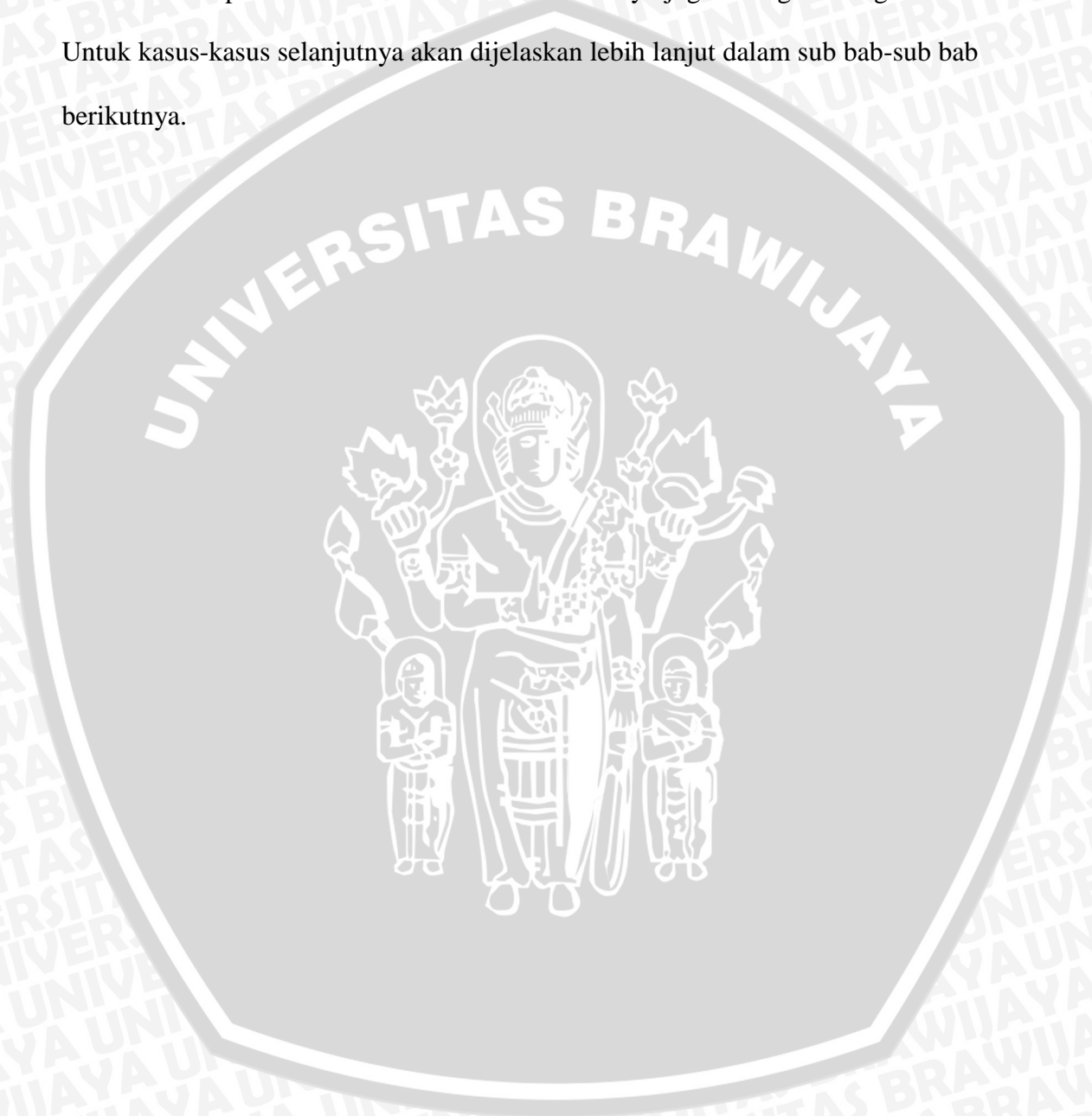
Jika melihat korban yang pertama yakni Nyonya Hasiah, berdasarkan Teori Mendelson akan peranan korban dimana hubungan korban dan pelaku dapat dilihat dari tingkat kesalahannya yang dibedakan menjadi 5 (lima) macam¹⁶², yaitu :

1. Yang sama sekali tidak bersalah,
2. Yang jadi korban karena kelalaiannya,
3. Yang sama salahnya dengan pelaku,
4. Yang lebih bersalah dari pelaku,
5. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

Nyonya Hasiah mengenakan kalung emas disaat ia sedang berada di jalan raya yang berpotensi menimbulkan keinginan orang untuk berbuat jahat kepadanya. Ia lalai dalam menjaga dirinya sendiri dari niat jahat orang lain. Jadi, dalam hal ini korban juga memberikan kontribusi penting timbulnya suatu perbuatan tindak pidana. Selain itu, dalam kasus ini Nyonya Hasiah sudah seharusnya mendapatkan haknya sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

¹⁶² Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hal. 19-20

tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu dengan cara mendapatkan nasihat hukum agar tidak mengenakan perhiasan yang berlebihan dan juga lebih waspada terhadap keadaan sekitar. Selain itu, Nyonya Hasiah juga sudah melaporkan kasus tersebut ke Kepolisian Resor Pasuruan dan kasusnya juga ditangani dengan baik. Untuk kasus-kasus selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut dalam sub bab-sub bab berikutnya.



B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pengendara Kendaraan Bermotor yang Mengalami Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.

Dalam sub bab ini akan dijelaskan bentuk perlindungan hukum yang didapatkan oleh korban pengendara kendaraan bermotor yang mengalami tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Kepolisian Resor Pasuruan dalam menangani kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan :

1. Annisa Aninditha – Vania Delicia, Mahasiswi,

Kedua korban yang masih mengenyam pendidikan di perguruan tinggi negeri Universitas Brawijaya ini mengalami kejadian tragis yang terjadi untuk pertama kalinya. Para korban tersebut menceritakan kejadian yang dialaminya terkait dengan perampasan barang berharga milik mereka. Pada tahun 2012 silam disaat mereka sedang kembali menuju ke arah Malang dari Sidoarjo, Annisa yang pada saat itu mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan sekitar 45 km/jam di daerah Sukorejo tiba-tiba dari samping kanan sebuah sepeda motor berada disisi kendaraan Annisa, dan mencoba mengambil tas milik Annisa yang ditaruh di bawah kakinya. Vania, yang duduk di belakang pun seketika berteriak untuk membuat para perampas tersebut pergi, namun para perampok tersebut berhasil mengambil tas milik Annisa. Mereka berdua pun akhirnya menuju ke Polsek Sukorejo untuk melaporkan kejadian tersebut. Setelah menceritakan semuanya, Annisa dan Vania mendapatkan surat kehilangan sebagai bukti bahwa mereka telah melapor kehilangan barang-barang

berharga yang dimilikinya. Disini, korban merasa kasusnya tidak ada titik terangnya, dan hanya berhenti setelah mereka menceritakan kejadian yang dialaminya itu dan membuat mereka trauma untuk berkendara lagi. Korban tersebut pun mengatakan bahwa mereka tidak memakai pakaian mencolok, dan kejadiannya pun di saat waktunya orang-orang berangkat kerja yakni pukul 08.00 WIB. Annisa dan Vania mengalami kerugian yaitu hilangnya tas berisikan dompet yang di dalamnya (STNK, SIM, KTP, KTM, uang tunai, ATM) dan juga handphone. Terdapat hubungan berdasarkan dengan sasaran tindakan pelaku⁸³, yaitu sebagai berikut :

1. Korban Langsung, yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran atau objek perbuatan pelaku. Dalam hal ini, Annisa termasuk salah satu korban langsung.
2. Korban Tidak Langsung, yaitu mereka yang meskipun tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa yang dalam hal ini Vania termasuk salah satu korban yang mengalami rasa trauma secara tidak langsung.

Kasus Annisa-Vania ini, jika dilihat dari segi kesalahannya, korban menaruh tas di bawah sehingga tampak mencolok untuk para pelaku mengambil kesempatan tersebut. Hal ini termasuk dalam Teori Mendelson dilihat dari derajat kesalahan korban sehingga menarik perhatian pelaku pencurian tersebut.

⁸³ G. Widiartana, *Op.Cit.*, hal 22.

Adapun dampak psikologis yang dialami para kedua korban ini mereka menjadi trauma dan merasakan kecemasan yang berlebihan dalam berkendara selang beberapa bulan setelah kejadian tersebut.⁸⁴

2. Irul, Mahasiswa

Mahasiswa Universitas Airlangga ini juga mengalami kejadian yang naas. Ia kehilangan sepeda motornya di saat ia menuju ke Surabaya dari arah Malang. Kejadian ini terjadi di pagi hari sekitar pukul 05.00 WIB itu, Irul diikuti dan dikepung oleh 3 kendaraan bermotor. Seketika itu juga, seorang pelaku memukulkan helmnya ke kepala korban, dan korban pun seketika jatuh dari motornya. Si korban sempat mencoba melakukan perlawanan. Namun, para pelaku pencurian tersebut yang berjumlah 6 orang seketika itu juga melakukan ancaman dan menodongnya dengan senjata tajam yaitu clurit. Karena tidak berani melawan, korban pun lari menuju ke perkampungan setempat dan mencari pertolongan kepada warga. Oleh warga setempat, Irul dibawa ke Polres Pasuruan untuk dimintai keterangannya. Irul menceritakan secara terperinci kejadian yang dialaminya dengan perasaan masih trauma dan kaget. Pihak kepolisian pun segera memberikan arahan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut selagi menunggu perkembangan kasus ia pun diberikan surat kehilangan sebagai proses awal. Karena tidak ada perkembangan dari kepolisian setelahnya, irul pun menyudahi penyelidikan dan fokus untuk memulihkan rasa trauma yang

⁸⁴ Wawancara dengan Annisa Aninditha – Vania Delicia (Korban Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan), 2 Oktober 2012 diolah.

dialaminya. Irul mengalami kerugian berupa raibnya sepeda motor jenis Mega Pro.⁸⁵

Pelaku yang berjumlah 3 orang tersebut dan menggunakan ancaman kekerasan termasuk pencurian dengan kekerasan diperberat dengan unsur penyertaan yang pelakunya dua orang atau lebih. Selain itu, kejadian tersebut terjadi pada malam hari menambah beratnya sanksi yang akan dikenakan pelaku jika tertangkap.

3. Fajar Fakhrur, Mahasiswa

Fajar, mahasiswa Universitas Brawijaya ini juga menjadi korban pencurian dengan kekerasan. Awal mulanya terjadi pada pukul 05.15 WIB Fajar mengendarai motornya menuju Malang, tiba-tiba pelaku memepet korban sehingga sepeda motor berhenti dan keluar dari jalan aspal. Lalu salah satu pelaku turun dari kendaraanya dan mengeluarkan dan membacokkan clurit ke punggung korban dan dikarenakan korban ketakutan, ia pun melarikan diri. Pelaku berhasil merampas motor korban, dan korban pun melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pasuruan diantarkan oleh warga sekitar. Setelah memberikan keterangan kurang lebih 1 jam, Fajar pun dijemput orangtuanya untuk segera dibawa ke Rumah Sakit. Sama halnya dengan kejadian korban sebelumnya, untuk mengurus proses penyelidikan lebih lanjut dibutuhkan waktu sesuai dengan ringan atau beratnya kasus tersebut. Karena merasa terlalu lama, Fajar pun tidak mengajukan proses penyelidikan lebih lanjut, selain itu klaim asuransi sudah keluar terlebih dahulu. Dalam proses wawancara, Fajar menambahkan sejak

⁸⁵ Wawancara dengan Irul (Korban Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan), 3 Oktober 2012 diolah.

kejadian itu 2-3 bulan awal, ia merasa trauma dan khawatir untuk berkendara sendiri.⁸⁶

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara kepada pihak yang terkait dan berwenang yakni dengan Kasat Reskrim Kepolisian Resor Pasuruan Iptu Riyanto, S.H. Beliau memaparkan bahwa bentuk-bentuk perlindungan hukum yang didapatkan korban dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu dengan memberikan pelayanan terhadap korban. Disini, yang dimaksud dengan memberikan pelayanan terhadap korban dengan cara menerima laporannya, dan menindak lanjuti kasus tersebut dengan mengarahkan untuk pengajuan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan) dan jika barang yang telah hilang berhasil ditemukan, akan segera dilakukan pengembalian barang yang hilang tersebut ke pemilik aslinya. Jika korban mengalami luka-luka akibat kejadian tersebut, akan segera dibawa ke Rumah Sakit. Kemudian beliau memaparkan untuk mengajukan Berkas Acara Perkara (BAP) ke Kejaksaan agar menjadi bukti bahwa kasus ini ditangani dengan benar. Selain itu, Iptu Riyanto menjelaskan perlindungan hukum yang selama ini telah diberlakukan di wilayah hukum Pasuruan dan sekitar dengan memberikan jaminan keamanan berupa :

1. Patroli jalan raya antisipai kejahatan,
2. Mempertajam krinreserse masing-masing wilayah untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan.⁸⁷

⁸⁶ Wawancara dengan Fajar Fakhur, (Korban Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan), 03 Maret 2013 diolah.

⁸⁷ Wawancara dengan Kasat Reskrim Iptu Riyanto, S.H., tanggal 21 Pebruari 2013 diolah.

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, bergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Perlindungan Hukum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi-Saksi Dalam Pelanggaran HAM yang Berat adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam pemberian rasa aman baik fisik maupun mental, para pihak aparat keamanan telah melaksanakan tugasnya dalam menjaga kamtibmas. Berdasarkan pemaparan sebelumnya yang diungkapkan oleh Iptu Riyanto, untuk menciptakan rasa aman dan nyaman beliau beserta para petugas lainnya melakukan patroli jalan raya untukantisipasi adanya tindak kejahatan. Dan juga menempatkan para petugas-petugas kepolisian untuk berjaga-jaga di daerah rawan tindak kejahatan.

Berdasarkan keterangan korban-korban tersebut, terlalu lamanya mereka untuk bisa melanjutkan proses penyelidikan membuat mereka tidak ingin meneruskan kasusnya tersebut. Mereka lebih memfokuskan pemulihan diri dari rasa trauma, dan mengesampingkan kerugian materi yang seharusnya bisa ditindak lanjuti dengan adanya SP2HP.

C. Hak-Hak yang Didapatkan Korban Pencurian dengan Kekerasan.

Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak-hak dan juga kewajiban yang tertuang dalam setiap perundang-undangan dan konstitusi. Pemenuhan hak-hak korban sebanding dengan pemberian perlindungan hukum terhadap korban, karena dengan dipenuhinya hak-hak korban maka hal tersebut adalah salah satu hal kecil bentuk perlindungan hukum yang bisa dirasakan oleh korban. Hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Iptu Riyanto, beliau menjelaskan lebih lanjut tentang hak-hak yang didapatkan korban yang mengalami tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu dengan pemberian perlakuan yang sama di mata hukum (*Equality before The Law*). Dengan memberlakukan semua korban sama di hadapan hukum, apapun jabatannya, statusnya, semuanya diterima dan ditangani dengan baik dan menyeluruh. Selain itu, sudah menjadi hak korban untuk menerima laporan terkait perkembangan kasus yang dilaporkan oleh korban/pelapor dengan mengirimkan SP2HP tersebut ke rumah korban/pelapor. Pengembalian barang bukti kepada korban jika berhasil ditemukan juga termasuk hak-hak yang didapatkan korban. Melakukan patroli secara rutin ialah salah satu bentuk hak jaminan keamanan yang diberikan oleh aparat kepolisian.⁸⁸

Hak-hak korban secara yuridis terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 poin 3, 5, 6, dan 12 menyatakan: Korban dan saksi memiliki hak untuk memberikan keterangan tanpa

⁸⁸ *Ibid.*

tekanan, bebas dari pertanyaan menjerat, dan mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus sekaligus mendapatkan nasihat hukum. Sesuai dengan hasil wawancara sebelumnya dengan para korban, korban memberikan keterangan secara leluasa dan tanpa mendapatkan tekanan dari pihak kepolisian. Selain itu para korban (Annisa-Vania) mendapatkan nasihat hukum dari pihak kepolisian agar lebih berwaspada dalam berkendara. Sesuai dengan wawancara korban sebelumnya (Irul-Fajar) penggunaan SP2HP dirasa masih kurang bermanfaat dan jarang dipakai oleh korban karena prosesnya yang termasuk lama. Sehingga, membuat mereka urung untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Iptu Riyanto pun menjelaskan bahwa hak-hak korban salah satunya dengan menerima SP2HP (Surat Perkembangan Hasil Penyelidikan).

Secara Teoritis bahwa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) adalah surat yang diberikan kepada pelapor / pengadu tentang perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan yang ditandatangani oleh atasan penyidik dengan melalui tahapan-tahapan⁸⁹:

1. SP2HP pertama kali diberikan adalah pada saat setelah mengeluarkan surat perintah penyidikan dalam waktu 3 (tiga) hari Laporan Polisi dibuat.
2. SP2HP yang diberikan kepada pelapor berisi pernyataan bahwa laporan telah diterima, nama penyidik dan nomor telepon/HP.
3. Waktu pemberian SP2HP pada tingkat penyidikan untuk kasus :

⁸⁹ Telaah Penerapan SP2HP, (Online) <http://sapto.staff.uns.ac.id/files/2010/01/telaah-penerapan-sp2hp1.pdf>, 04 Pebruari 2013.

- a. Kasus ringan, SP2HP diberikan pada hari ke-10, hari ke-20 dan hari ke-30
- b. Kasus sedang, SP2HP diberikan pada hari ke-15, hari ke-30, hari ke-45 dan hari ke-60.
- c. Kasus sulit, SP2HP diberikan pada hari ke-15, hari ke-30, hari ke-45, hari ke-60, hari ke-75 dan hari ke-90.
- d. Kasus sangat sulit, SP2HP diberikan pada hari ke-20, hari ke-40, hari ke-60, hari ke-80, hari ke-100 dan hari ke-120.
- e. Tahap penyelesaian dihitung pada saat penyerahan berkas perkara yang pertama.

Melihat lamanya proses untuk mengajukan SP2HP ini yang dirasa kurang efektif untuk para korban dalam memperjelas kasus mereka. Semakin lama kasus tersebut tidak ada kejelasannya, membuat para korban semakin merasa tidak aman. Yang juga sangat dirugikan adalah kurangnya hak-hak korban dalam peraturan perundang-undangan yang fokus hanya pada kekurangan fisik dihitung dengan ganti rugi dan mengabaikan kerugian psikis yang dialami korban. Rasa trauma lebih sering dialami para korban pencurian dengan kekerasan ini. Terlebih lagi kejelasan akan pelakunya sudah tertangkap atau belum menambah rasa khawatir mereka. Pentingnya untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, seharusnya dijadikan prioritas utama para aparat kepolisian untuk menciptakan wilayah yang aman, nyaman, dan tentram.

D. Upaya Kepolisian Resort Kabupaten Pasuruan dalam Menanggulangi

Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.

Dalam menegakkan hukum pidana, Polisi sebagai unsur utama dan paling awal berhadapan dengan kejahatan dan pelaku kejahatan, melaksanakan kegiatan penanggulangan kejahatan untuk mewujudkan situasi kamtibmas terkendali, dalam wadah kelembagaan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).⁹⁰

Untuk melaksanakan dan mewujudkan keamanan dan ketertiban nasional di wilayah hukum Kepolisian Resor Pasuruan, Kasat Reskrim Iptu Riyanto menegaskan bahwa ia dan segenap aparat kepolisian dalam mengurangi dan mencegah tindak pidana pencurian dengan kekerasan berupaya melakukan tindakan pencegahan represif dan persuasif. Dalam hal ini, tindakan represif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Pasuruan yakni dengan menangkap pelaku dan memberikan tindakan tegas jikalau pelaku berusaha melarikan diri akan ditembak di tempat. Penindakan tegas ini sangatlah dibutuhkan, karena para pelaku tindak kejahatan saat ini sangat lihai dalam melarikan diri dari kejaran aparat kepolisian. Selain tindakan pencegahan represif, tindakan persuasif yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resor Pasuruan yaitu dengan melakukan patroli di jam-jam dan tempat-tempat yang rawan untuk terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Jam-jam rawan yang dimaksud oleh Iptu Riyanto yakni pagi hari yaitu subuh atau dini hari atau sekitar pukul 04.00-06.00 WIB, dan di malam hari yakni pukul 23.00-04.00 WIB. Adapun tempat-tempat rawan

⁹⁰ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hal 25.

yang sering dijadikan incaran oleh para pelaku tindak pidana pencurian ialah jalan raya yang lengang, biasanya dilakukan di pagi hari, lalu di daerah perbankan yang saat ini juga marak terjadi adanya perampokan dan biasanya dilakukan di siang hari atau pukul 12.00 WIB, dan juga daerah pertokoan yang biasa terjadi di malam hari.

Tindak pencegahan represif dan persuasif yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resor Pasuruan menurut teori dari Gerson W. Bawengan, termasuk dalam kategori tugas polisi. Secara lebih terperinci Gerson W. Bawengan, membagi tugas Polisi sebagai berikut :

1. Tugas Preventif, berupa patroli-patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur, mengadakan tanya jawab dengan orang lewat, termasuk usaha pencegahan kejahatan atau pelaksanaan tugas preventif, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
2. Tugas Represif, menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan perkara dan bahkan berusaha untuk menemukan kembali barang-barang hasil curian, melakukan penahanan untuk kemudian diserahkan ke tangan kejaksaan yang kelak akan meneruskannya ke Pengadilan.

Yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resor Pasuruan yaitu, tugas preventif yang berupa patroli-patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur, mengadakan tanya jawab dengan warga sekitar, termasuk usaha pencegahan kejahatan atau pelaksanaan tugas preventif, memelihara

ketertiban dan menjamin keamanan umum. Tugas Represif, berupa menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan perkara dan bahkan berusaha untuk menemukan kembali barang-barang hasil curian, melakukan penahanan untuk kemudian diserahkan ke tangan kejaksaan yang kelak akan meneruskannya ke pengadilan.⁹¹

Sama halnya dengan pernyataan dari Iptu Riyanto, akan segera menangkap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan mengajukan berkas sampai ke tingkat kejaksaan. Untuk barang yang telah hilang dan berhasil ditemukan kembali, akan segera dikembalikan kepada pemilik sebelumnya. Iptu Riyanto pun menambahkan sulitnya untuk menangkap pelaku, dan berpindah-pindah tempat juga modusnya semakin canggih membuat para pihak kepolisian kewalahan dalam menangani kasus ini. Terlebih lagi kurang personil dan juga sarana prasarana kurang tercukupi dari pemerintah yang membuat Kepolisian Resor Pasuruan selalu berupaya untuk memberikan rasa aman dan nyaman sesuai dengan kemampuan mereka seutuhnya.

⁹¹ *Ibid*, hal 28.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab – bab terdahulu, berikut ini akan disampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan pembahasan Penulisan Hukum ini :

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Kepolisian Resor Pasuruan yakni memberikan pelayanan terhadap korban dengan menerima laporannya dan menindaklanjuti kasus tersebut hingga proses tingkat kejaksaan. Selain itu, memberikan jaminan keamanan berupa melakukan patroli jalan raya untuk mengantisipasi kejahatan, dan mempertajam krinreserse masing-masing wilayah untuk mempersempit ruang gerak pelaku.
2. Bentuk perlindungan hukum yang didapatkan para korban yakni hanya menerima bukti surat kehilangan, dan lamanya prosedur untuk melanjutkan proses penyelidikan dan mengabaikan rasa trauma yang dihadapi korban menjadi kelemahan sistem perundang-undangan kita dalam melindungi korban dari segi psikis.
3. Hak-hak yang didapatkan korban yaitu berupa pemberlakuan sama di mata hukum tanpa membedakan status dan jabatan, hak menerima laporan hasil penyelidikan atau SP2HP

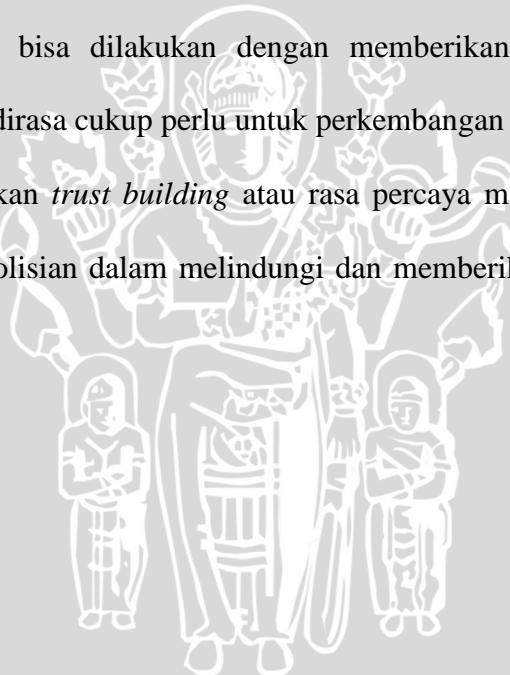
yang mana dirasa cukup lamban oleh para korban, dan pengembalian barang bukti kepada korban jika berhasil ditemukan, selain itu memberikan jaminan keamanan seperti melakukan patroli.

4. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh aparat Kepolisian Resor Pasuruan dalam mengurangi dan mencegah tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu dengan melakukan tindakan persuasif berupa patroli di waktu-waktu rawan yakni pagi hari dan malam hari, di jalan-jalan sepi, pertokoan dan perbankan.
5. Kendala yang dialami aparat Kepolisian Resor Pasuruan sehingga sampai saat ini masih cukup banyak tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Pasuruan dikarenakan pelakunya sangat lihai, dan berpindah-pindah tempat, juga modusnya lebih canggih. Selain itu, keterbatasan personil dimana perbandingannya 1 personil mengawasi 300 orang. Wilayah yang terlalu luas dan tidak sebanding dengan jumlah personil dan juga kurangnya sarana dan prasarana dari pemerintah menjadi faktor utama kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Pasuruan.

B. Saran

Disamping dirumuskan kesimpulan, penulis memandang perlu menyampaikan beberapa saran dengan pokok masalah yang dibahas sebagai berikut :

- a. Diharapkan agar para aparat kepolisian lebih memfokuskan keadaan psikis korban dan tidak pula mengabaikan kerugian materiil.
- b. Diharapkan agar masyarakat lebih waspada dengan adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di jalan raya.
- c. Memberikan perlindungan khusus untuk para korban yang mengalami trauma yang bisa dilakukan dengan memberikan informasi secara berkala atau dirasa cukup perlu untuk perkembangan kasus.
- d. Menumbuhkan *trust building* atau rasa percaya masyarakat terhadap lembaga kepolisian dalam melindungi dan memberikan rasa aman dan nyaman.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulkalir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

Abdusaalam, *Viktimologi*, PTIK, Jakarta, 2010

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003

Arief Gosita, *Viktimologi dan KUHAP*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1986

Ashofia, Burhan.. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

_____, *Viktimologi, Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Chaerudin, Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Ghalia Press, Jakarta, 2004

G Widiartana, *Victimology Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Atmajaya, Yogyakarta, 2009

Gultom, Elisatris. Mansur, Dikdik M. Arief, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampal)*, PT. Alumni, Bandung, 2009

Muhammad Kemal Darmawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan.*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994

Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987

Rena Yulia, *Victimologi, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Bandung, 2010

Ronny Soemitro Hanintijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988

Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2005

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Tentang Psikologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1983

Soerjono Soekanto, *Beberapa Catatan tentang Psikologi Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1979

_____, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor*, Bina Aksara, Jakarta, 1998

Sudikno Mertokusomo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1999

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2012.

Undang-Undang :

Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat.

TAP MPR No. VII.MPR/2000, item (g) tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Internet :

Anonymous, Hukum Online, 08 Pebruari 2009, Penerapan SP2HP Bagian Dari Evaluasi Quick Wins Polri (Online)
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21132/penerapan-sp2hp-bagian-dari-evaluasi-iquick-winsi-polri>, (20 Januari 2013).

-----, Telaah Penerapan SP2HP, (Online)
<http://sapto.staff.uns.ac.id/files/2010/01/telaah-penerapan-sp2hp1.pdf> , 04 Pebruari 2013.

www.bps.go.id (04 Februari 2013).

<http://www.polri.go.id>.

<http://www.polres-pasuruan.com>

<http://www.putracenter.net>/Definisi Hukum Menurut Para Ahli.

<http://etd.eprints.ums.ac.id>/Pengangkutan Orang.

Komnas PKPU Probolinggo, 18 Januari 2013, *Sd*

urat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) (Online),
<http://komnaspkuprobinggo.wordpress.com/2012/01/18/surat-pemberitahuan-perkembangan-hasil-penyidikan-sp2hp-2/>, 20 Januari 2013.

Yurianto Kadir, Hukum dan Viktimologi Part 2 (Online),
[http://yusriantokadir.files.wordpress.com/hukum dan viktimologi part II](http://yusriantokadir.files.wordpress.com/hukum-dan-viktimologi-part-II), 15 Oktober 2012.